



**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI 6
PROVINSI DI JAWA**

SKRIPSI

Oleh:

**Ma'ruf Hanuraga
NIM 140810101224**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI 6
PROVINSI DI JAWA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Ma'ruf Hanuraga
NIM 140810101224**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Siti Nurhayati dan Ayahanda Haryono (Alm) tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

“Bergaulah dengan para pemenang. Karena pemenang memberi pengaruh baik kepada anda. Sedangkan pecundang dapat meracuni anda.”

(Merry Riana)

“Sukses bukan tentang berapa banyak uang yang anda hasilkan, tetapi ini tentang apakah anda sudah berdampak baik untuk kehidupan orang lain.”

(Michelle Obama)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'ruf Hanuraga

NIM : 140810101224

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi 6 Provinsi di Jawa” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2018

Yang menyatakan,

Ma'ruf Hanuraga

NIM 140810101224

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI 6
PROVINSI DI JAWA**

Oleh

Ma'ruf Hanuraga
NIM 140810101224

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi 6 Provinsi
di Jawa
Nama Mahasiswa : Ma'ruf Hanuraga
NIM : 1140810101224
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 26 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc
NIP. 195608311984031002

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P
NIP. 197207131999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI 6
PROVINSI DI JAWA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ma'ruf Hanuraga

NIM : 140810101224

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

8 Juni 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si (.....)
NIP. 196004121987021001
2. Sekretaris : Adhitya Wardhono, S.E.,M.Sc.,Ph.D (.....)
NIP. 197109051998021001
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani, M.Si (.....)
NIP. 196411081989022001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

***Pengaruh Upah Minimum provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor
Konstruksi di Indonesia: Studi 6 Provinsi di Jawa***

Ma'ruf Hanuraga

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa time series (tahun 2006-2015) dan cross section (6 provinsi di Pulau Jawa). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode Random Effect digunakan alat bantu software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di 6 provinsi Pulau Jawa tahun 2006-2015.

Kata kunci: Upah Minimum Provinsi, Penyerapan Tenaga Kerja Konstruksi.

Influence of provincial minimum wage on employment absorption of construction sector in indonesia: study 6 provinces in java

Ma'ruf Hanuraga

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

This study examines the effect of Number of Experts on Province Minimum Wages to the absorption of labor. This study collected time series data (2006-2015) and cross section (6 provinces in Java) from the Central Statistic Agency (BPS) and journals as a supporter. To achieve the objective the analytical method used is linear regression analysis method of panel data with Random Effect method. Eviews 9 is used as a tool to analyse the data. The results showed that, Province Minimum Wages have a positive influence on employment in 6 provinces of Java Island in 2006-2015.

Keywords: Province Minimum Wage, Employment Absorption of Construction Sector.

RINGKASAN

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi 6 Provinsi di Jawa; Ma'ruf Hanuraga; 140810101224; 2018; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Peran upah minimum dalam pasar tenaga kerja dan perekonomian mendapat pandangan pro dan kontra baik secara teoritis maupun empiris (Herr, 2002; Kryriska dan Kopycinska, 2015). Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan yang memperdebatkan hubungan antara upah minimum dan tenaga kerja. Pandangan ekonom Neoklasik menyatakan bahwa upah berperan penting terhadap pasar tenaga kerja, dimana upah ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja (Bradley, 2007; Kryriska dan Kopycinska, 2015; Nikoloski, 2016). Pandangan tersebut menyatakan bahwa ketika upah dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan berdampak pada penurunan pada sisi permintaan tenaga kerja (Fletwood, 2016). Bertolak belakang dengan teori tersebut, Keynes menyatakan bahwa upah bukan merupakan faktor kunci yang memengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kebijakan upah minimum dalam suatu perekonomian, maka hal tersebut kurang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebangun dengan pemikiran Keynes, konsep segmentasi pasar tenaga kerja juga berpandangan bahwa dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat upah, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya yang sesuai dengan segmen pasarnya (Jakstiene, 2010; Kumas, *et al.*, 2014; Kryriska dan Kopycinska, 2015).

Hubungan antara penetapan upah minimum dan tenaga kerja juga menjadi topik diskusi di kalangan peneliti. Para peneliti mencoba mencari tahu peran upah minimum terhadap lapangan kerja dengan data dan fenomena yang ada pada objek

penelitian. Neumark (2015) menunjukkan hasil bahwa peningkatan upah minimum memiliki pengaruh besar yang secara langsung berpengaruh terhadap penurunan lapangan kerja yang semakin tinggi. Sebangun dengan hal tersebut, Bishop (2018); Bodnar, dkk (2018) menekankan bahwa kenaikan upah minimum pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat yang telah memiliki pekerjaan, namun sangat berpengaruh kepada para pencari kerja, sehingga kondisi tersebut mencerminkan bahwa kenaikan tersebut memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kondisi dan arah kebijakan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penetapan upah minimum di berbagai negara, seperti promosi pertumbuhan ekonomi, (Tamada, 2011). Fenomena upah minimum di Indonesia menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, tujuan dari penetapan dan peningkatan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh (Sitomurang, 2010; Febrianica dan Pratomo, 2015; Wiryawan, 2016). Upah minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (BPS, 2017).

Peningkatan upah pekerja selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan upah minimum akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi, untuk menghindari kerugian, maka produsen akan mempertahankan pekerja dengan kualitas tinggi dan memberhentikan pekerja dengan kualitas rendah. Selain itu, produsen akan lebih selektif dalam memilih calon pekerja baru. Hal tersebut akan mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, presiden RI mencanangkan program pembangunan, yakni melalui Kantor Staff Presiden (KSP) 2 Tahun Jokowi JK (2016) program tersebut bernama "Nawa Cita". *Nawa Cita* itu sendiri adalah sebuah pemikiran yang direncanakan guna memajukan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Realisasi program tersebut dapat tercapai melalui penanganan ekstra yang dimulai dengan pembangunan fondasi kemudian diteruskan dengan upaya

percepatan di berbagai bidang. Salah satu fokus utama dalam program *Nawa Cita* adalah infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa. Infrastruktur juga merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian. Keberadaan infrastruktur dalam perekonomian akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah.

Pandangan–pandangan teoritis, empiris dan fenomena yang ada di Indonesia, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Secara teoritis, penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu teori menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah pada daerah atau negara tersebut. Pandangan teoritis lain menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh upah, tetapi oleh kemampuan yang dimiliki oleh angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi. Begitu pula dari pandangan empiris juga memiliki pandangan yang saling bertolak belakang. Beberapa teori menyatakan bahwa perubahan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, ada beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa penerapan upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua gap tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya bidang konstruksi, dimana tenaga kerja pada bidang tersebut dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum regional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa dengan menggunakan analisis preskriptif dan metode *Panel Least Square* (PLS). Hasil analisis preskriptif menggambarkan perkembangan ketenagakerjaan dari ke enam provinsi berdasarkan dari pergerakan grafik dari variabel penelitian yang digunakan serta penambahan variabel pendukung agar nantinya lebih menegaskan dari hasil analisis yang dibutuhkan. Metode PLS merupakan metode analisis regresi yang mengkombinasikan data panel dan *least square*. Metode PLS merupakan suatu pendekatan yang

menggunakan metode OLS biasa dengan data yang digunakan adalah data panel yang paling sederhana. Metode ini menggunakan tiga perbandingan model untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam analisis penelitian. Model tersebut antara lain yaitu *Panel Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan salah satu model dari ketiganya melewati tahapan uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*.

Hasil estimasi menggunakan analisis preskriptif menggambarkan beberapa hasil yang cenderung mengalami tren peningkatan selama tahun 2006 hingga 2015. Untuk menggambarkan hasil analisis preskriptif ini dilakukan penambahan data yaitu pekerja tetap konstruksi. Pekerja tetap merupakan semua karyawan yang bekerja pada perusahaan konstruksi yang sudah diangkat sebagai pekerja tetap yang bekerja sebagai pelaksana pada perusahaan dengan waktu kerja penuh (*full-time*) dan umumnya pengajiannya rutin setiap bulan. Analisis deskriptif variabel penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan analisis menggunakan metode *Panel Least Square* (PLS). Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif diterima. Apabila upah minimum meningkat maka penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi dapat dikatakan meningkat pula. Penelitian ini sesuai teori upah minimum yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Jika tingkat upah naik diatas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah berada di bawah biaya hidup minimum maka hal ini akan menurunkan kekuatan penawaran tenaga kerja (*labor force*). Dimana pada empirisnya tingkat upah sangat berpengaruh pada jenis pekerja dengan keahlian atau *supervisor*. Tetapi kurang berpengaruh kepada jenis pekerja yang tidak memiliki keterampilan

atau hanya sebagai pelaksana saja. Berikut grafik yang menggambarkan pekerja ahli atau yang memiliki keterampilan (*supervisor*).

Pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berkenaan dengan upaya penyerapan tenaga kerja dalam bidang konstruksi lebih mempertimbangkan perlu adanya peningkatan dan kemudahan yang lebih pada pemberian sertifikat ahli (SKA) mengapa demikian, dalam sebuah proyek konstruksi, terdapat tujuan yang diharapkan apabila tenaga kerjanya memiliki SKA yaitu untuk menunjang keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Biasanya pada sebuah proyek konstruksi, para pekerja atau tim diharuskan memiliki sertifikat SKA. Dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia yang dapat dilihat dari kualitas industri konstruksi melalui sertifikat SKA yang dimiliki. Saat seorang tenaga ahli menangani sebuah proyek konstruksi, kemampuannya bisa dilihat pada sertifikat SKA. Selain untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi seseorang secara nasional, juga bisa untuk skala internasional. Selain itu sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat dan sebagai bukti yang sah kompetensi seorang tenaga ahli, perlu memiliki SKA. Sehingga masyarakat akan mengakui kompetensi seorang tenaga ahli dalam bidang konstruksi. Selain tujuan diatas, juga untuk memenuhi syarat Undang-Undang. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999. Selain itu juga ada Keppres dan SK Menteri tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. Sebagai seorang tenaga ahli yang resmi, perlu adanya memiliki sertifikat keahlian tersebut.

Dalam menyikapi adanya perbedaan jenis pekerja dalam konstruksi, pemerintah bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap provinsi di Jawa harusnya berhati-hati dalam menyikapi terutama dalam mengambil kebijakan penetapan upah minimum dan juga diharapkan dalam pengambilan penetapan upah dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kompetensi.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi 6 Provinsi di Jawa” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku dosen pembimbing II dan dosen pembimbing akademik (DPA) yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Adhitya Wardhono, S.E.,M.Sc.,Ph.D. yang telah meluangkan waktu dengan ikhlas dan tulus untuk membimbing dan memberikan saran terhadap penelitian saya.
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Ibunda Siti Nurhayati dan Ayahanda Almarhum Haryono yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;
8. Tubagus Hanuransyah selaku adik kandung penulis yang telah memberi dukungan;
9. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Hendra Hadi A, Dea Magdalena Tertia, Razan Febriayu, Nurma Kamelia S, Bagus Suryo N, Halimatus Putrya, Gita Triya Ratnasari, Miranda Lutfisari, Wardatul Lutfiyah, Triana Wulandari, Devira Nuarisa, terimakasih atas motivasinya;
10. Semua rekan-rekan UKM Paduan Suara FEB;
11. Teman-teman KKN 13 Desa Gunung tugel Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, Friska Evi, Tia Nurdahana, Annisa Dewi, Laily Puji, Duroh, Ega Daniati Choirul anam, Rizky, Muhammad Saifudin, ;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 11 April 2018

Penulis

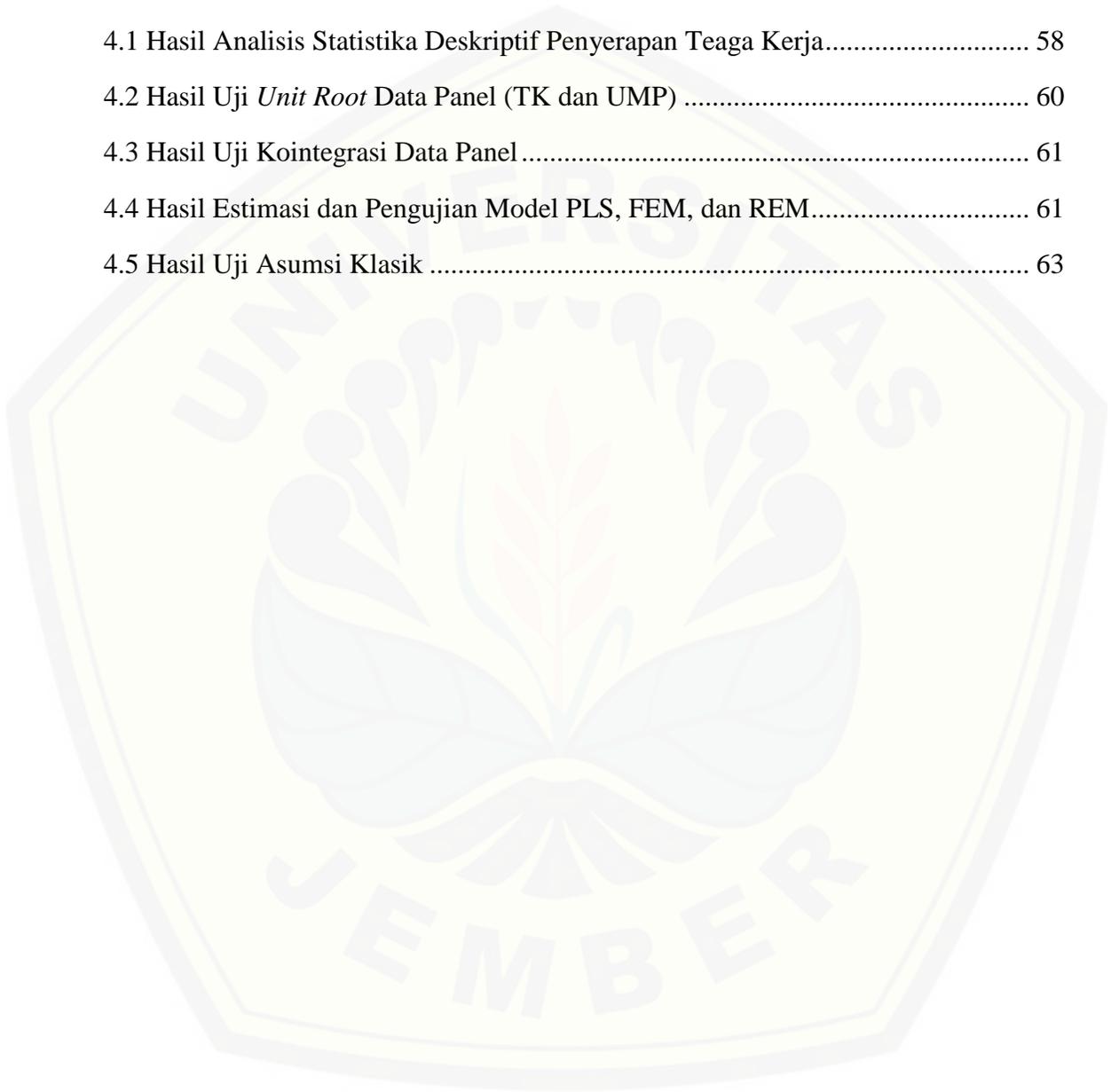
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Teori Tenaga Kerja</i>	9
2.1.2 <i>Permintaan Tenaga Kerja</i>	11
2.1.3 <i>Upah Minimum Provinsi</i>	14
2.1.4 <i>Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja</i>	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Konseptual	31

2.4 Hipotesis Penelitian	36
2.5 Keaslian dan Limitasi Penelitian	37
2.5.1 Keaslian Penelitian	37
2.5.2 Limitasi Penelitian	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis dan Sumber Data	39
3.2 Desain Penelitian	39
3.3 Spesifikasi Model penelitian	41
3.4 Metode Analisis Data	42
3.4.1 Metode Panel Least Square (PLS)	42
3.4.2 Prosedur Pengujian Panel Least Square (PLS).....	43
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum	48
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	48
4.1.2 Gambaran Umum Penyerapan Tenaga Kerja Konstruksi di Pulau Jawa	49
4.1.3 Gambaran Umum Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa	50
4.2 Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Pada Enam Provinsi di Jawa	53
4.2.1 Hasil Analisis Preskriptif Pada Perkembangan Ketenagakerjaan di Enam Provinsi.	53
4.2.2 Hasil Analisis Statistik Kausal Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Pulau Jawa	58
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Diskusi Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.	65
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	25
4.1 Hasil Analisis Statistika Deskriptif Penyerapan Tenaga Kerja.....	58
4.2 Hasil Uji <i>Unit Root</i> Data Panel (TK dan UMP)	60
4.3 Hasil Uji Kointegrasi Data Panel	61
4.4 Hasil Estimasi dan Pengujian Model PLS, FEM, dan REM.....	61
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	63



DAFTAR GAMBAR

1.1 Upah Minimum Provinsi 2006-2015	3
1.2 Profesi Tenaga Ahli di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015	5
1.3 Pekerja Tetap di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015.....	6
2.1 Kuantitas Tenaga Kerja yang Memaksimumkan Laba	13
2.2 Kerangka Konseptual	35
3.1 Desain Penelitian	41
4.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Konstruksi Tahun 2008-2015	50
4.2 Tingkat Upah Minimum Provinsi 2006-2015	51
4.3 Posisi Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta	54
4.4 Posisi Ketenagakerjaan Provinsi Banten.....	55
4.5 Posisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat	55
4.6 Posisi Ketenagakerjaan Provinsi D.I Yogyakarta	56
4.7 Posisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.....	57
4.8 Posisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur	57
4.9 Profesi Tenaga Ahli di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015	67

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Konstruksi, dan Upah Minimum Provinsi Tahun 2006-2015.....	79
2 Hasil Uji Stasioneritas.....	81
3 Hasil Uji Kointegrasi	82
4a Hasil Uji Chow.....	83
4b Hasil Uji Hausman.....	83
4c Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	84
4d Hasil Regresi Data Panel.....	85
5a Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
5b Hasil Uji Heteroskedastisitas	86
5c Hasil Uji Normalitas	87

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

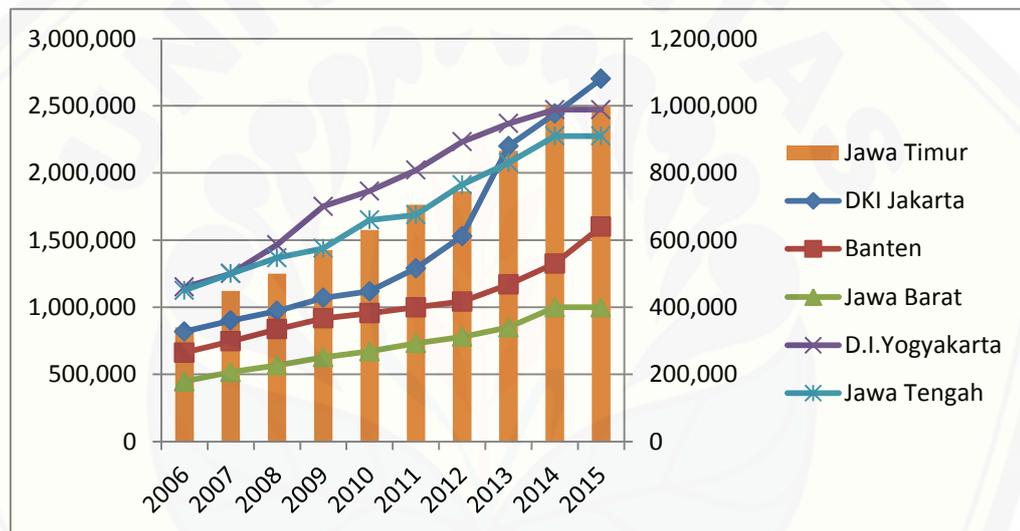
Upah dan tenaga kerja merupakan topik ekonomi yang terus menjadi bahan diskusi di kalangan ekonom dan peneliti. Pembatasan upah yakni, kebijakan upah minimum menjadi salah satu topik pembahasan di dalamnya. Peran upah minimum dalam pasar tenaga kerja dan perekonomian mendapat pandangan pro dan kontra baik secara teoritis maupun empiris (Herr, 2002; Kryriska dan Kopycinska, 2015). Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan yang memperdebatkan hubungan antara upah minimum dan tenaga kerja. Pandangan ekonom Neoklasik menyatakan bahwa upah berperan penting terhadap pasar tenaga kerja, dimana upah ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja (Bradley, 2007; Kryriska dan Kopycinska, 2015; Nikoloski, 2016). Pandangan tersebut menyatakan bahwa ketika upah dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan berdampak pada penurunan pada sisi permintaan tenaga kerja (Fletwood, 2016). Bertolak belakang dengan teori tersebut, Keynes menyatakan bahwa upah bukan merupakan faktor kunci yang memengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kebijakan upah minimum dalam suatu perekonomian, maka hal tersebut kurang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebangun dengan pemikiran Keynes, konsep segmentasi pasar tenaga kerja juga berpandangan bahwa dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat upah, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya yang sesuai dengan segmen pasarnya (Jakstiene, 2010; Kumas, *et al.*, 2014; Kryriska dan Kopycinska, 2015).

Hubungan antara penetapan upah minimum dan tenaga kerja juga menjadi topik diskusi di kalangan peneliti. Para peneliti mencoba mencari tahu peran upah minimum terhadap lapangan kerja dengan data dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Eldring dan Alsos (2012) telah mencoba meneliti hubungan tersebut dengan objek beberapa negara di Benua Eropa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum menyebabkan penurunan nilai pada pekerja

dengan upah rendah (*low-quality*), dan akan menyebabkan pengusaha menekan permintaan pada tenaga kerja melalui seleksi yang lebih ketat, sehingga tenaga kerja *fresh graduate* akan memiliki peluang yang sangat kecil yang memiliki pengalaman kerja dan produktivitas yang rendah akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Kabeya, dkk (2015) dengan objek penelitian yang lebih kecil, yakni Inggris, Perancis dan Belanda, menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap teori Neoklasik, dimana penetapan upah minimum memengaruhi permintaan tenaga kerja, dimana ketika upah minimum dinaikkan, maka menyebabkan penurunan lapangan pekerjaan pada tiga negara tersebut. Selaras dengan hasil tersebut, Neumark dan Wascher (2006); Neumark (2015) menunjukkan hasil bahwa peningkatan upah minimum memiliki pengaruh besar yang secara langsung berpengaruh terhadap penurunan lapangan kerja yang semakin tinggi. Sebangun dengan hal tersebut, Bishop (2018); Bodnar, dkk (2018) menekankan bahwa kenaikan upah minimum pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat yang telah memiliki pekerjaan, namun sangat berpengaruh kepada para pencari kerja, sehingga kondisi tersebut mencerminkan bahwa kenaikan tersebut memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kontras dengan hasil tersebut, Hohberg dan Lay (2015); Menon dan Rodgers (2017); Vazquez, dkk (2017) justru menunjukkan hasil bahwa peningkatan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pekerja pada sektor formal dan sedikit berdampak negatif terhadap pekerja di sektor informal. Cengiz, dkk (2018) dengan objek yang berbeda juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa penetapan upah minimum di Amerika Serikat hanya berpengaruh semu terhadap penurunan lapangan pekerjaan yang ditunjukkan dengan peningkatan lapangan pekerjaan dengan upah di atas upah minimum seiring penurunan lapangan pekerjaan yang diakibatkan dari penetapan upah minimum tersebut. sebangun dengan kedua hasil tersebut, Hafner, dkk (2016) dengan menggunakan *Meta Analysis* menyatakan bahwa tidak ada hasil yang signifikan yang menunjukkan pengaruh perubahan tingkat upah minimum terhadap pekerjaan.

Kondisi dan arah kebijakan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penetapan upah minimum di berbagai negara, seperti promosi pertumbuhan ekonomi, (Tamada, 2011). Fenomena upah minimum di Indonesia menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, tujuan dari penetapan dan peningkatan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh (Sitomurang, 2010; Febrianica dan Pratomo, 2015; Wiryawan, 2016). Upah minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (BPS, 2017). Hal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Upah Minimum Regional/Provinsi 2009-2015 (rupiah) (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017, diolah).

Gambar 1.1 di atas menunjukkan variasi Upah Minimum Provinsi (UMP) enam Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan Gambar di atas, Upah Minimum Provinsi (UMP) dari ke enam Provinsi tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2015, walaupun terdapat sebagian Provinsi yang mengalami penurunan UMP pada tahun 2015. Penerapan UMP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan kelayakan hidup dan inflasi merupakan faktor penting yang memengaruhi UMP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut (Merdekawaty, *et al.*, 2016). Di sisi lain, Provinsi yang memiliki tingkat UMP terendah berturut-turut dari tahun 2006 hingga tahun 2015 adalah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Provinsi Jakarta menunjukkan

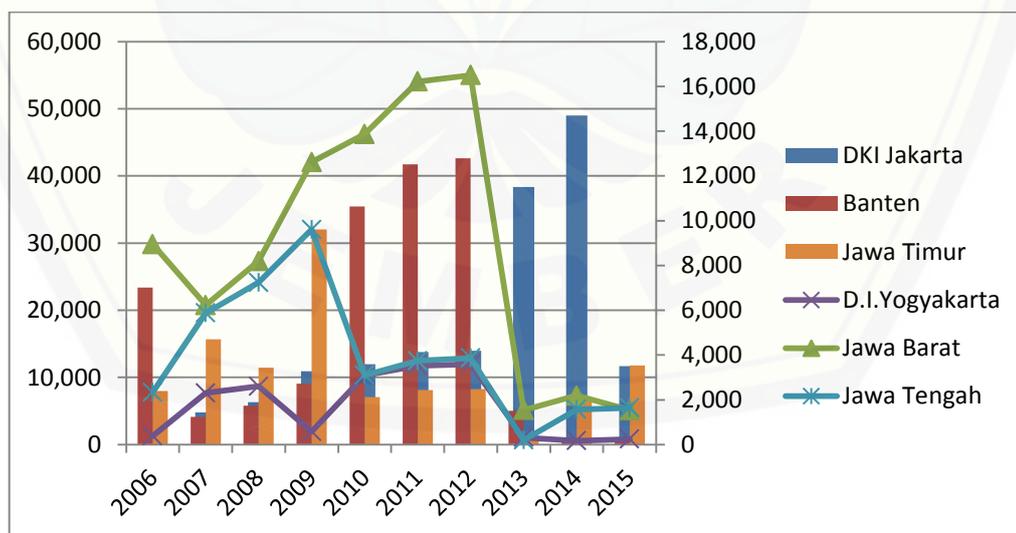
peningkatan UMP yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga mencapai tingkat UMP tertinggi di tahun 2015 dari lima Provinsi lainnya.

Peningkatan upah pekerja selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan upah minimum akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi, untuk menghindari kerugian, maka produsen akan mempertahankan pekerja dengan kualitas tinggi dan memberhentikan pekerja dengan kualitas rendah. Selain itu, produsen akan lebih selektif dalam memilih calon pekerja baru. Hal tersebut akan mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, presiden RI mencanangkan program pembangunan, yakni melalui Kantor Staff Presiden (KSP) 2 Tahun Jokowi JK (2016) program tersebut bernama “*Nawa Cita*”. *Nawa Cita* itu sendiri adalah sebuah pemikiran yang direncanakan guna memajukan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Realisasi program tersebut dapat tercapai melalui penanganan ekstra yang dimulai dengan pembangunan fondasi kemudian diteruskan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Salah satu fokus utama dalam program *Nawa Cita* adalah infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui perbaikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan penyiapan proyek. Infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang sedang dalam pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang nampak di antara pulau-pulau di Indonesia. Pembangunan sistem transportasi umum terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan, dan pelebaran tol merupakan beberapa bentuk pembangunan infrastruktur di area darat.

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian. Keberadaan infrastruktur dalam perekonomian akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan output ekonomi dalam jangka pendek dan akan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang (Permana,

2010; Stupak, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, *World Development Report* World Bank (1994) dan Todaro (2000) menjelaskan bahwa faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur dalam suatu negara. Infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak positif dan akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah karena akan memudahkan aktivitas masyarakat dalam distribusi aliran barang. Infrastruktur yang memadai akan membentuk sistem transportasi yang cepat, mudah, murah, lancar, efektif dan efisien.

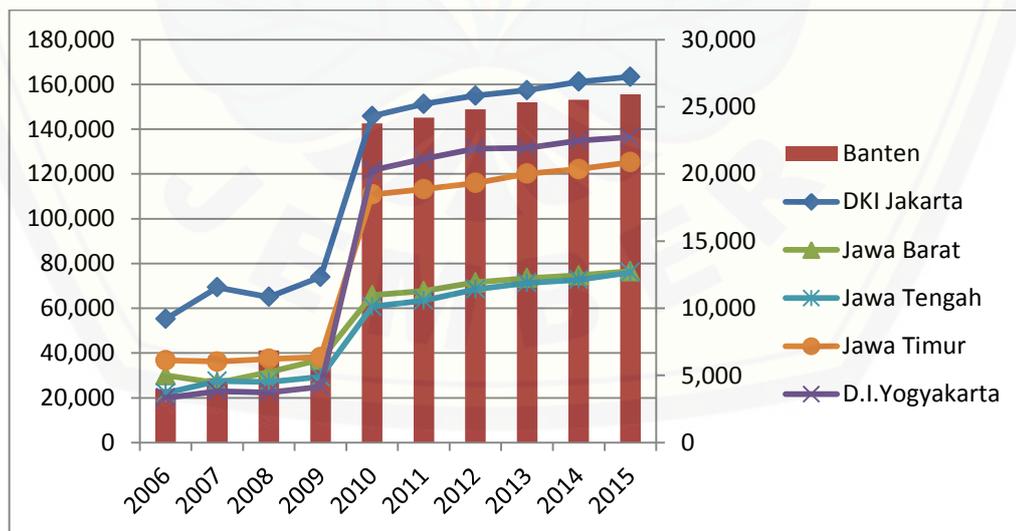
Pencapaian pembangunan infrastruktur tidak terlepas dengan tingkat profesionalitas pekerja dalam bidang tersebut (Adi dan Adillah, 2012). Salah satu upaya peningkatan kualitas pekerja yaitu melalui sistem *quality assurance* dalam bentuk sertifikasi. Sistem tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari UU 18/1999 Pasal 15 PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang mengharuskan tenaga kerja konstruksi untuk mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Hasil penerapan dari UU 18/1999 Pasal 15 PP 28/2000 ditunjukkan oleh Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2 Profesi Tenaga Ahli di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017, diolah).

Gambar 1.2 menunjukkan fluktuasi jumlah profesi tenaga ahli di perusahaan konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki profesi tenaga ahli konstruksi tertinggi sejak tahun 2006 hingga tahun 2012. Jumlah profesi tenaga ahli pada bidang konstruksi di Provinsi Jawa Barat kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang memiliki jumlah profesi tenaga ahli di bidang konstruksi terendah dari ke enam Provinsi di pulau Jawa. Apabila dilihat dari pertumbuhan profesi tenaga ahli di bidang konstruksi dari enam provinsi di Pulau Jawa, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan terbaik di antara lima Provinsi lainnya.

Tenaga kerja ahli berbeda dengan tenaga kerja biasa. Tenaga ahli sendiri dinilai berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang lebih banyak bekerja dengan ilmu pengetahuan, konsep dan pemikiran (Musyafa, 2015). Pada sebuah proses produksi tidak hanya mempekerjakan tenaga ahli saja, namun juga mempekerjakan tenaga biasa, seperti pekerja tetap dalam sebuah perusahaan. Dinamika jumlah pekerja tetap pada perusahaan konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa ditunjukkan oleh Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Pekerja Tetap di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017, diolah).

Gambar 1.3 menunjukkan dinamika atau pergerakan jumlah pekerja tetap perusahaan konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan Gambar 1.3, jumlah tenaga kerja tetap bidang konstruksi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Namun demikian, DKI Jakarta merupakan Provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja tetap bidang konstruksi tertinggi dibanding dengan lima Provinsi lainnya. Sedangkan lima Provinsi lainnya, yakni Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur memiliki jumlah tenaga kerja tetap bidang konstruksi yang cukup stabil pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Kemudian, ke enam Provinsi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 hingga tahun 2015.

Pandangan-pandangan teoritis, empiris dan fenomena yang ada di Indonesia, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Secara teoritis, penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu teori menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah pada daerah atau negara tersebut. Pandangan teoritis lain menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh upah, tetapi oleh kemampuan yang dimiliki oleh angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi. Begitu pula dari pandangan empiris juga memiliki pandangan yang saling bertolak belakang. Beberapa teori menyatakan bahwa perubahan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, ada beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa penerapan upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua gap tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya bidang konstruksi, dimana tenaga kerja pada bidang tersebut dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum regional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tetap pada bidang konstruksi dan diikuti pergerakan fluktuatif oleh penyerapan tenaga kerja ahli dan pekerja tetap bidang konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Fenomena tersebut pada akhirnya menjadi alasan yang meletakkan pengaruh

Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi di pulau Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan ketenagakerjaan dari ke enam provinsi di pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan ketenagakerjaan dari ke enam provinsi di pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional/Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan maka manfaat yang bisa dipetik dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam masalah penyerapan tenaga kerja khususnya yang berkaitan dengan Upah Minimum Regional/Provinsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penyerapan tenaga kerja
3. Sebagai bahan referensi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, yaitu menguraikan teori yang berhubungan dengan kajian penelitian penyerapan tenaga kerja di enam provinsi di Jawa yang dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi kedalam lima subbab. Subbab 2.1 mengulas mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar kerangka berpikir penulis dalam menjelaskan arah penelitian. Pada subbab 2.2 menjelaskan mengenai studi empiris sebelumnya sebagai bukti pendukung penelitian. Kerangka berpikir terGambarkan pada subbab 2.3 yang secara umum lalu difokuskan pada arah penelitian yang dituju. Subbab 2.4 menentukan hipotesis penelitian yang digunakan untuk menduga hasil penelitian. Pada subbab 2.5 yaitu menjelaskan mengenai keaslian dan limitasi penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tenaga Kerja

Dalam menentukan sebuah keberhasilan pembangunan salah satu faktornya adalah pelaksana pembanguna itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan juga seluruh penduduk di Indonesia pada umumnya. Di Indonesia sendiri yakni sebagai negara yang berkependudukan terbilang besar, berarti indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar pula. (Barthos, 2001). Sebagai keperluan guna menganalisis sebuah ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk pada suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan yakni, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja. Mengingat batasan usia kerja berbeda-beda antar negara yang satu dengan yang lain. Di indonesia sendiri batas kerja yang dianut ialah minimum 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Batas usia kerja dalam versi Bank Dunia adalah antara 15 hingga 64 tahun lamanya (Dumairy, 1996)

Istilah tenaga kerja (*man power*) dipilah pula dalam dua kelompok berbeda yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang dapat dikatakan masuk atau tergolong angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk

dalam usia kerja yang bekerja, atau telah memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak sedang bekerja, dan yang mencari suatu pekerjaan. Sedangkan golongan bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau seorang penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari suatu pekerjaan. (Dumairy, 1996). Banyak sedikitnya angkatan kerja kergantung pula pada komposisi penduduknya. Apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk terutama pada penduduk yang golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak itu diharapkan akan mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2008). Jumlah seluruh tenaga kerja yang terserap merupakan golongan yang masuk pada angkatan kerja. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) konsep ketenagakerjaan adalah istilah bekerja yakni kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Dan keseluruhan penduduk, ada pula yang tidak berkesempatan untuk bekerja, yang dinamakan menganggur. Pengangguran terbuka dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam sebuah proyek dalam perusahaan konstruksi, Sastrohadiwiryono (2005) menyatakan bahwa dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencana/ahli tenaga kerja. Perencana tenaga kerja dimaksudkan agar seseorang dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusunan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan tersebut meliputi: penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja

2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990; Sukirno, 2003; Salvatore, 2004). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Miller dan Meiners (2007) berpendapat bahwa *Value of Marginal Product* (VMP) dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja. Nilai marjinal produk (VMP) dapat diperoleh dari perkalian antara Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*) dengan harga produk. Produk Fisik Marginal dapat diartikan sebagai perubahan total produk fisik dari penambahan satu unit input variabel (Tenaga Kerja). Besarnya VMP dapat dicari melalui perkalian antara (MPP x P), dimana nilai dari perkalian tersebut akan sama dengan harga input produk yang bersangkutan yaitu P_N dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Besarnya VMP = P diperoleh dari pernyataan bahwa kombinasi input optimal atau biaya minimal dalam proses produksi akan terjadi apabila kurva *isoquant* menjadi *tangens*

terhadap *isocost* dengan sudut dari garis *isocost* sama dengan $-w/r$. Sedangkan besarnya sudut di setiap titik pada isoquant sama dengan $MPPI/MPPK$, maka kombinasi input yang optimal adalah: $w/r = MPPL/MPPK$ atau $MPPK/r = MPPi/w$. Dimana r adalah tingkat bunga implisit yang bersumber dari modal sedangkan w adalah tingkat upah per unit. Apabila persamaan diatas diperluas secara umum maka akan menjadi :

$$MPP_x/P_x = MPP_y/P_y \dots \dots \dots (2.1)$$

Minimalisasi biaya input atau maksimalisasi output atas penggunaan input menyebabkan tingkat harga MPP untuk setiap input sama dengan inputnya. Maka, kenaikan satu unit input, misalnya x , akan memperbanyak biaya produksi sebanyak P_x , sekaligus akan memperbesar volume produk sebanyak MPP_x . Itu berarti rasio P_x / MPP_x merupakan tingkat perubahan total biaya perusahaan untuk setiap perubahan output fisiknya yang secara definitif berarti sama dengan biaya marginalnya *Marginal Cost* (MC). Dari sini maka persamaan diatas juga bisa dirubah menjadi :

$$MPP_x/P_x = MPP_y/P_y = MPP_n/P_n = 1/MC \dots \dots \dots (2.2)$$

Berdasarkan asumsi bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna maka persamaan diatas bisa dirubah menjadi :

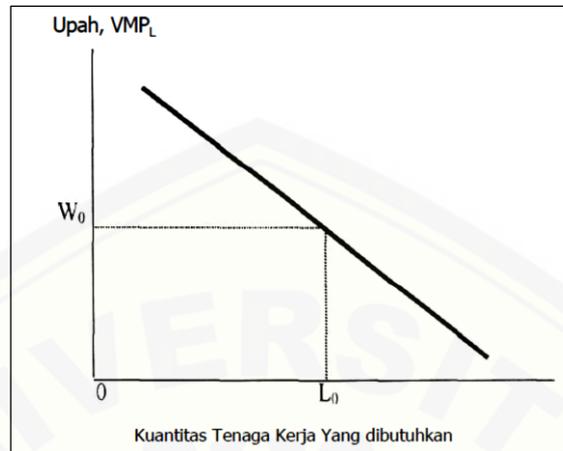
$$MPP_x/P_x = MPP_y/P_y = MPP_n/P_n = 1/MC - 1/MR = 1/P \dots \dots \dots (2.3)$$

Dari persamaan diatas kita bisa mengetahui bahwa:

$$MPP_x/P_x = 1/MR = 1/P, \text{ sehingga } MPP_x \times P = P_x \text{ untuk semua input.}$$

Hal tersebut mengimplikasikan bahwa kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja (jangka pendek) dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna (dengan catatan kuantitas semua input lainnya konstan). Harga output dari setiap perusahaan yang berada pada pasar yang kompetitif sempurna akan senantiasa konstan terlepas dari berapa kuantitas output yang dijualnya. Harga input disini juga kita asumsikan konstan. Penawarannya elastis sempurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah (Tingkat upah yang berlaku untuk

pekerja terampil yang dibutuhkan perusahaan) dan kurva VMP perusahaan. Ini diperlihatkan oleh Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kuantitas Tenaga Kerja yang Memaksimumkan Laba. (Sumber: Miller dan Meiners, 1993)

Jika tingkat upah per unit tenaga kerja yang memiliki kaulitaskonstan adalah W_0 maka kuantitas pekerja yang optimal adalah L_0 . Garis horizontal yang bertolak dari W_0 merupakan kurva penawaran tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna. Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan jika MPP_i lebih besar dari biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah riil yang dihitung sebagai (upah nominal/tingkat harga), upah riil ini mengukur jumlah output riil yang harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya, karena dengan mengupah satu pekerja lagi menghasilkan kenaikan output untuk MPP_L dan biaya pada perusahaan, Untuk upah riil perusahaan akan mengupah tenaga kerja tambahan selama MPP_L melebihi upah riil.

Bedasarkan asumsi bahwa tenaga kerja dapat ditambah dan faktor produksi lain tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula. Oleh karena itu, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka menurunkan MPP_i . Kondisi tersebut dikarenakan oleh nilai MPP_i yang mengikuti hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Bila harga atau tingkat upah tenaga kerja naik, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun, ini diperlihatkan

oleh kenaikan arus upah yang berpotongan dengan kurva VMP dalam kuantitas tenaga kerja yang lebih sedikit. Penurunan produk fisik marginal dari input modal, atau MPP_R disebabkan oleh penurunan unit modal yang dikerjakan oleh tenaga kerja. Jika sebuah mesin dioperasikan oleh satu orang, produk fisik marginal mesin itu akan menurun dibandingkan saat sebelumnya ketika mesin itu diuais oleh beberapa orang. Karena kini hanya ada satu pekerja, mereka tidak bisa bergantian menjalankan mesin, sehingga hasilnya lebih sedikit. Maka, modal akan bersifat komplementer terhadap tenaga kerja, atau ada komplementaritas diantara keduanya.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

Upah dapat dikatakan sebagai salah satu alat motivator untuk meningkatkan produktivitas kerja karena upah sebagai imbalan yang akan diterima seseorang setelah melakukan pekerjaan, makin tinggi tingkat upah yang diterima oleh seseorang akan membuat karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya. Upah disini merupakan balas jasa yang berupa uang atau jasa lain yang diberikan oleh lembaga atau suatu organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Dalam pemberian suatu upah atau balas jasa ini dimaksudkan untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga tingkat semangat kerja karyawan dan agar selalu menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis akan dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Pada dasarnya, upah yang diterima para pekerja dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu Upah Nominal, yaitu sejumlah uang yang dinyatakan dalam bentuk uang yang telah diterima rutin oleh pekerja. Yang kedua adalah Upah Riil yaitu, kemampuan upah nominal yang telah diterima oleh pekerja apabila ditukarkan dengan barang atau jasa yang didapatkan dari pertukaran uang tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat upah nantinya juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan (Chuzna, 2013; Sumarsono, 2003)

Apabila digunakan suatu asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal seperti meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang telah diproduksi oleh perusahaan. Biasanya konsumen memberikan respon cepat apabila terjadi sebuah kenaikan harga barang yaitu biasanya dengan mengurangi konsumsi bahkan tidak lagi membeli barang yang biasa dibeli. Akibat yang terjadi banyak barang yang tidak terjual dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target tersebut dapat diartikan dengan efek skala produksi atau *Scale Effect*. Selain itu apabila upah naik, dengan asumsi barang-barang lain tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih tertarik menggunakan teknologi padat modal yang digunakan untuk proses suatu produksi dan menggantikan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan tenaga kerja yang terjadi karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin dapat disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *Substitution Effect*. (Sumarsono, 2003; Budiawan 2013)

Burt (1963) dalam bukunya berjudul “Labor Market, Unions and Government Policies” menyatakan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah pekerja, diantaranya yaitu:

1. Teori Kebutuhan Hidup (*Subsistence Theory*)

Subsistence Theory atau disebut juga teori upah alami yang dikemukakan David Ricardo (1817), bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Jika tingkat upah naik diatas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah berada di bawah biaya hidup minimum maka hal ini akan menurunkan kekuatan penawaran tenaga kerja (*labor force*).

2. Teori Upah Besi (*Iron Wage Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, teori upah besi menentang teori upah alami. Ferdinand Lassalle menyatakan bahwa dengan adanya teori kebutuhan hidup, kepentingan pekerja tidak terlindungi. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pekerja, peran serikat pekerja sangat penting. Dengan adanya serikat pekerja tersebut, pekerja akan berusaha menuntut upah yang melebihi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Dengan adanya teori upah besi, dirasa cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dikarenakan dengan adanya kenaikan upah akibat desakan serikat pekerja, justru akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga para penganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya produksi.

3. Teori Dana Upah (*Wage Fund Theory*)

Teori upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill (1836). Menurut teori ini tingkat upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah penduduk. Teori ini juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkah upah cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja.

4. Teori Produktivitas Marginal (*Marginal Productivity Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh J.B Clark yang menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi (tenaga kerja) sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Atau dengan kata lain nilai pertambahan hasil marginal seorang pekerja sama dengan upah yang diterima pekerja tersebut.

Teori ini menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas marginalnya terhadap pengusaha.

Berdasarkan berbagai teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah pekerja, dalam penelitian ini dapat masuk atau dapat digunakan dasar yakni pada teori upah alami yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Jika tingkat upah naik di atas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah berada di bawah biaya hidup minimum maka hal ini akan menurunkan kekuatan penawaran tenaga kerja (*labor force*).

2.1.4 Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja

Berdasarkan teori upah alami, upah yang diperoleh oleh tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian (*unskilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sehingga apabila tingkat upah berada di atas kebutuhan hidup pekerja, akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akhirnya justru menurunkan permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, peningkatan upah minimum mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja, yakni dapat mengurangi jumlah permintaan terhadap tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja yang tidak terdidik atau kurang berpengalaman (Mankiw 2003). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai koefisien dari upah minimum untuk semua tenaga kerja adalah negatif kecuali tenaga kerja terdidik atau profesional. Menurut Simanjuntak (2001), apabila tingkat upah yang ditetapkan pada suatu daerah tinggi, maka akan berimbas pada peningkatan biaya produksi, akibatnya dari tingginya tingkat upah maka harus dilakukannya efisiensi, yaitu pengurangan tenaga kerja dalam perusahaan, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja dilihat berdasarkan kepada jenis pekerja yang

bersangkutan, karena didalam suatu perusahaan konstruksi dimana terdapat tenaga profesional yang sebagai (*supervisor*) dan juga terdapat pekerja yang tidak terdidik atau kurang berpengalaman yang dapat dikatakan hanya sebagai pelaksana dalam suatu perusahaan konstruksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hafner *et al.* (2016) berfokus pada upah minimum nasional Inggris yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1999 dengan tujuan menganalisis secara lebih rinci sub-kelompok pasar tenaga kerja spesifik seperti wanita, karyawan paruh waktu dan orang muda. Investigasi juga dilakukan pada peningkatan upah minimum nasional yang berbeda selama resesi besar. Hasil penelitian tidak menemukan tidak ada efek pekerjaan yang merugikan secara statistik atau ekonomi yang berdampak signifikan baik pada pekerjaan, jam kerja atau pada probabilitas retensi kerja. Namun untuk efek pekerjaan pada sub-kelompok pasar tenaga kerja, ditemukan bahwa karyawan paruh waktu lebih terpengaruh oleh peningkatan upah minimum nasional daripada sub-kelompok lain, terlepas dari kapan terjadinya kenaikan. Hal ini terutama terjadi ketika melihat probabilitas retensi pekerjaan, dimana perkiraan terkait paruh waktu karyawan menunjukkan dampak negatif yang lebih besar pada retensi karyawan saat pengenalan upah minimum nasional di semua periode kecuali selama resesi besar. Hasil ini juga sama dengan tingkat upah minimum nasional pada sub-kelompok karyawan di bawah umur 25 tahun. Retensi tenaga kerja muda relatif lebih terpengaruh selama resesi daripada sub-kelompok lainnya.

Vazquez *et al.* (2017) menganalisis dampak kenaikan upah minimum terhadap upah dan tenaga kerja di Meksiko. Periode yang diteliti berjalan dari kuartal pertama 2012 hingga kuartal keempat 2013. Sumber variasi penelitian adalah pemerataan upah minimum pada akhir 2012 di dua wilayah negara. Sebagaimana dicatat sebelumnya hingga tahun 2012 ada tiga wilayah geografis untuk upah minimum Meksiko, A, B dan C. Zona A memiliki upah minimum tertinggi dan zona C terendah, sementara zona B adalah zona perantara. Menggunakan data Survei Pekerjaan dan Tenaga Kerja Nasional (ENOE) dengan

analisis ekonometrik dilakukan penampang melintang dan data panel individu. Hasil pertama menunjukkan bahwa rata-rata upah per jam di zona B naik antara 1,6% dan 2,6% untuk pekerja secara keseluruhan dan antara 1,8% dan 3,3% untuk pekerja upahan. Analisis pane menunjukkan hal yang serupa. Sementara itu terdapat tiga hasil yang perlu dicatat. Pertama, tidak ada bukti yang ditemukan efek negatif pada tenaga kerja atau penghasilan setelah keputusan untuk menaikkan upah minimum di zona geografis B. Kedua, terdapat bukti bahwa keputusan untuk menyelaraskan upah minimum di zona B dengan mereka yang berada di zona A menyebabkan peningkatan upah per jam tenaga kerja. Ketiga dan mungkin yang paling penting, kenaikan upah minimum di zona B mungkin telah bergeser insentif, sedemikian rupa sehingga baik mereka yang semula adalah pekerja upahan informal dan mereka yang wiraswasta menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk pindah ke pekerjaan formal. Kecenderungan untuk bertahan dalam pekerjaan formal juga tampaknya telah meningkat dan setidaknya dalam satu kasus kecenderungan yang akan terjadi pengangguran menurun.

Haryanto (2012) dalam penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat dampak investasi infrastruktur, terhadap penyerapan tenaga kerja dengan analisa data SNSE Provinsi Jawa Barat tahun 2010 dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pertama dengan nilai riil (nominal), kedua dengan melakukan analisis keterkaitan antar sektor ekonomi, ketiga dengan analisis dekomposisi. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa investasi infrastruktur berpengaruh positif terhadap penciptaan pendapatan sektoral. Investasi infrastruktur transportasi mampu memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kinerja sektor ekonomi. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan masyarakat di provinsi jawa barat.

Priyono (2018) dengan tujuan peneliti untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur. Analisa data berdasarkan data selama periode 2009-2015 dengan variabel yang digunakan adalah jumlah kemiskinan di jawa timur,

penyerapan tenaga kerja, dan upah minimum dengan menggunakan metode analisis *Ordinari Least Square* (OLS). Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penyerapan tenaga kerja terhadap Jumlah kemiskinan, dengan terus meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka akan terus menurun jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan upah minimum pekerja berperan positif terhadap Jumlah kemiskinan, dimana setiap tahunnya upah minimum pekerja mengalami kenaikan dan berdampak menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Baek dan Park (2015) memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai pengenalan upah minimum dan Tenaga Kerja, yang merupakan terapan dari korea selatan. Di dalam penelitiannya, menggunakan sebuah metode analisis yaitu *difference-in-differences*. Dimana metode ini digunakan guna untuk memperkirakan sebuah efek dari sebuah analisis dan membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah pada hasil variabel yang di analisis. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Jumlah karyawan, Total biaya tenaga kerja, Biaya tenaga kerja per pekerja, Total upah tahunan, Upah tahunan per pekerja, Upah bulanan rata-rata, Masukan energi yang digunakan, dan Input non-energi yang digunakan. Kesimpulan yang dapat diterima pada penelitian ini bahwa pengenalan upah minimum mendorong pekerja berupaya meningkatkan produktivitasnya, namun juga pengenalan upah minimum tidak berdampak buruk terhadap ketenaga kerjaan terlepas dari pengaruhnya terhadap biaya tenaga kerja.

Bazen dan Gallo (2009) menganalisis dikotomi negara-federal dalam efek upah minimum pada tenaga kerja remaja di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, menggunakan sebuah metode analisis *Fixed Effect* dengan menganalisis beberapa variabel yang di teliti antara lain rasio populasi tenaga kerja remaja, penghasilan rata-rata dalam dolar, tingkat pengangguran (%), dan penyebaran remaja dalam populasi. Setelah dilakukannya analisis, peneliti mengambil sebuah kesimpulan secara keseluruhan terdapat pengaruh positif kecil tetapi tidak signifikan dari kenaikan upah minimum pada tenaga kerja remaja. Pada periode sampai dengan tahun 1989 kenaikan tingkat upah minimum nasional tidak memiliki efek buruk pada penyerapan tenaga kerja.

Dolton *et al.* (2015) dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi efek tenaga kerja dan mengubah upah minimum: analisis spasial di Inggris. *Generalized Method Of Moment* (GMM) merupakan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digunakan karena muncul masalah *endogeneity*, sehingga model estimasi dengan pendekatan *fixed effect* ataupun *random effect* akan menghasilkan penduga yang bias dan tidak konsisten. Variabel yang digunakan peneliti antara lain adalah upah minimum nasional dan tingkat tenaga kerja dengan kesimpulan yang dapat diambil Tidak terdapat efek yang dapat dilihat dari pengenalan upah minimum nasional pada penyerapan tenaga kerja tetapi menunjukkan bagaimana perkiraan yang lebih tidak mungkin telah mengungkapkan berbagai efek positif dan negatif yang sangat berbeda yang ditemukan dalam beberapa literatur lain.

Gindling dan Terrell (2009) dimana peneliti menganalisis mengenai upah minimum, upah, dan tenaga kerja di berbagai sektor di Honduras. *Fixed Effect* dan *Generalized Method Of Moment* (GMM) merupakan sebuah model estimasi dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, pendekatan GMM yang digunakan dalam penelitian ini digunakan karena muncul masalah *endogeneity*, sehingga model estimasi dengan pendekatan *fixed effect* ataupun *random effect* akan menghasilkan penduga yang bias dan tidak konsisten. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, pengangguran, upah minimum, upah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa upah minimum diberlakukan secara efektif hanya di perusahaan berskala menengah dan besar, di mana kenaikan 1% dalam upah minimum mengarah pada peningkatan 0,29% dalam upah rata-rata dan pengurangan yang relatif besar dalam tingkat tenaga kerja sebesar -0,46%. Kami menemukan bahwa upah sektor publik meniru tren upah minimum tetapi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi tidak mengurangi pekerjaan di sana. Tidak ada efek yang dapat dilihat dari upah minimum terhadap upah pekerja di perusahaan kecil atau pekerja mandiri; namun, upah minimum yang lebih tinggi dapat menciptakan lebih banyak pengangguran. Kami menyimpulkan bahwa (bahkan di bawah estimasi batas atas kami tentang pengaruhnya terhadap upah pekerja), total pendapatan pekerja di sektor tertutup

yang besar jatuh dengan upah minimum yang lebih tinggi di Honduras, yang menjamin dialog kebijakan tentang struktur dan tingkat upah minimum.

Lang dan Kahn (1998) dalam penelitiannya guna menganalisis pengaruh dari hukum upah minimum pada distribusi ketenagakerjaan dengan disertakan bukti dan teori. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode analisis *Ordinari Least Square* (OLS) dan *Generalized Least Squares* (GLS). GLS dilakukan karena ketika sumsi-asumsi yang disyaratkan oleh metode OLS yaitu homokedastisitas dan non autokorelasi tidak dapat terpenuhi. Variabel-variabel yang digunakan didalamnya adalah upah minimum, dewasa >20th, mahasiswa, siswa remaja, lulusan SMA, tenaga kerja perempuan, pekerja paruh waktu, dan yang sudah menikah. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni, menunjukkan bahwa dalam hukum upah minimum terdapat persaingan yang semakin meningkat dari produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga membuat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah menjadi lebih buruk tanpa membuat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi menjadi lebih baik. Kami memberikan bukti bahwa hukum upah minimum mengalihkan pekerjaan dari orang dewasa ke remaja dan siswa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi distribusi dari upah minimum bahkan ketika mereka meningkatkan pekerjaan.

Lemos (2009) dalam penelitiannya guna menganalisis efek dari upah minimum di negara-negara berkembang. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode analisis *Ordinari Least Square* (OLS) dan *Generalized Least Squares* (GLS). Variabel-variabel yang digunakan didalamnya adalah upah minimum, biaya tenaga kerja, tenaga kerja, dan juga sektor informal. Dalam penelitian ini kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti adalah bahwa upah minimum menekan distribusi upah kedua sektor tetapi tidak mempengaruhi tingkat tenaga kerja. Efek kompresi adalah distribusi upah sektor formal lebih tinggi dibanding distribusi sektor informal. Hasil ketenagakerjaan menunjukkan bahwa baik jumlah pekerjaan maupun jumlah jam kerja yang berubah di kedua sektor setelah kenaikan upah minimum.

Menona dan Rodgers (2017) menganalisis tenaga kerja anak dan upah minimum yang dilakukan di India. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan

metode analisis *Ordinari Least Square* (OLS) dan variabel yang digunakan didalamnya adalah upah minimum, tenaga kerja, dan pekerja anak. Berdasarkan ke tiga variabel tersebut yang dipilih oleh peneliti, kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil estimasi tersebut adalah Secara teoritis, dampak upah minimum pada tenaga kerja anak bisa berjalan baik, jadi bukti empiris dari negara dengan tingkat tenaga kerja anak yang tinggi dan segudang undang-undang upah minimum di berbagai negara bagian dan industri membantu mengurangi ambiguitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa memandang jenis kelamin, di daerah perkotaan, upah minimum yang lebih tinggi mengurangi tenaga kerja anak dalam pekerjaan rumah tangga. Di daerah pedesaan hasil yang sama berlaku untuk anak perempuan sementara tenaga kerja rumah tangga meningkat untuk anak laki-laki. Upah minimum hampir tidak berdampak pada tenaga kerja anak di luar rumah di daerah perkotaan dan pedesaan.

Sen *et al.* (2011) peneliti di dalam penelitiannya menganalisis bukti dari Kanada dengan adanya pekerja remaja, kemiskinan dan juga upah minimum. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode analisis *Ordinari Least Square* (OLS) dan variabel yang digunakan didalamnya adalah tenaga kerja remaja, kemiskinan, dan upah minimum. kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil estimasi variabel tersebut adalah menunjukkan bahwa peningkatan 10% dalam upah minimum secara signifikan berkorelasi dengan penurunan 3%-5% dalam tenaga kerja remaja. Lebih jauh, kenaikan 10% dalam upah minimum juga secara signifikan terkait dengan peningkatan 4% -6% dalam persentase keluarga yang tinggal di bawah *Low Income Cut Offs* (LICOs). Perkiraan perbedaan selisih dari gelombang 1993, 1995, dan 1998 dari Survei Keuangan Konsumen (SCF) mendukung temuan-temuan ini karena mereka berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh oleh remaja merupakan bagian tidak remeh dari pendapatan rumah tangga untuk keluarga di bawah Penghasilan Rendah. Oleh karena itu, upah minimum yang lebih tinggi dapat secara paradoks menghasilkan guncangan negatif yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga di kalangan keluarga berpenghasilan rendah.

Zavodny (2000) menganalisis upah minimum pada pekerjaan dan jam kerja seseorang. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode analisis *Ordinari Least Square* (OLS) dan variabel yang digunakan didalamnya adalah upah minimum, jam kerja, tenaga kerja remaja. kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil estimasi dari variabel tersebut adalah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan tingkat tenaga kerja tetapi tidak mempengaruhi jam kerja baik di kalangan remaja yang bekerja atau semua remaja. Hasil tingkat individu tidak menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki dampak negatif yang signifikan pada jam kerja oleh upah rendah remaja yang kemungkinan akan terpengaruh oleh kenaikan upah minimum. Hasilnya menunjukkan bahwa tenaga kerja remaja dengan upah rendah cenderung tetap bekerja, relatif terhadap tenaga kerja remaja dengan upah tinggi, ketika upah minimum dinaikkan. Namun, efek buruk ini hilang ketika tenaga kerja remaja dengan upah rendah ini dibandingkan dengan tenaga kerja remaja upah rendah lainnya selama periode ketika upah minimum tidak meningkat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Peneliti / Judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1	Hafner <i>et al.</i> (2016)	Wage on Employment: a Meta-Analysis	<i>Meta Regression Analysis</i> (MRA)	Upah Minimum Nasional, Tenaga Kerja Muda, Tenaga Kerja Perempuan, Tenaga Kerja Laki-laki, Tenaga Kerja Paruh Waktu	Upah minimum nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja namun, untuk sub-kelompok tertentu yang berbeda menunjukkan efek yang merugikan untuk beberapa kelompok pasar tenaga kerja, seperti karyawan paruh waktu.
2	Vazquez <i>et al.</i> (2017)	The Impact of the Minimum Wage on Income and Employment in Mexico	<i>Difference-in-difference on the basis of cross section and panel data</i>	Tenaga kerja, jenis kelamin, umur, indikator tempat tinggal perkotaan, tingkat pendidikan	Setelah keputusan menaikkan upah di zona B tidak ditemukan efek negatif terhadap tenaga kerja, keputusan menyelaraskan upah minimum di zona B dengan yang berada di zona A menyebabkan peningkatan upah per jam pekerja, kenaikan upah minimum di zona B sehingga menyebabkan pergeseran status dimana yang semula pekerja upahan informal, dan yang semula wiraswasta menunjukkan kecenderungan pindah ke pekerjaan formal.

3	Haryanto (2012)	Dampak Infrastruktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat	Investasi Transportasi Tenaga Ekonomi dan Pendapatan	Metode analisis RAS dan <i>Cross-Entropy</i>	Investasi Infrastruktur dan Penyerapan Tenaga Kerja.	Investasi infrastruktur berpengaruh positif terhadap penciptaan pendapatan sektoral. investasi infrastruktur transportasi mampu memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kinerja sektor ekonomi. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan masyarakat di provinsi jawa barat.
4	Priyono (2018)	Analisis Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Pekerja Terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015		Metode analisis <i>Ordinari Least Square</i> (OLS)	Jumlah Kemiskinan di Jatim, Penyerapan TK, dan Upah Minimum.	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penyerapan tenaga kerja terhadap Jumlah kemiskinan, dengan terus meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka akan terus menurun jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Upah minimum pekerja berperan positif terhadap Jumlah kemiskinan, dimana setiap tahunnya upah minimum pekerja mengalami kenaikan dan berdampak menekan angka kemiskinan.
5	Baek dan Park (2015)	Pengenalan Upah Minimum dan Tenaga Kerja: Bukti dari korea selatan		Metode analisis <i>difference-in-differences</i>	Jumlah karyawan, Total biaya tenaga kerja, Biaya tenaga kerja per pekerja, Total upah tahunan, Upah tahunan per pekerja,	Bahwa pengenalan upah minimum mendorong pekerja berupaya meningkatkan produktivitasnya, namun jugapengenalan upah minimum tidak berdampak buruk terhadap ketenaga kerjaan terlepas dari pengaruhnya terhadap biaya tenaga kerja.

				Upah bulanan rata-rata, Masukan energi yang digunakan, dan Input non-energi yang digunakan.	
6	Bazen dan Gallo (2009)	The state–federal Dichotomy In The Effects Of Minimum Wages On Teenage Employment In The United States	Metode analisis <i>Fixed Effect</i>	Rasio populasi tenaga kerja remaja, Penghasilan rata-rata dalam dolar, Tingkat pengangguran (%), Penyebaran remaja dalam populasi.	Secara keseluruhan terdapat pengaruh positif kecil tetapi tidak signifikan dari kenaikan upah minimum pada tenaga kerja remaja. Pada periode sampai dengan tahun 1989 kenaikan tingkat upah minimum nasional tidak memiliki efek buruk pada penyerapan tenaga kerja.
7	Dolton <i>et al.</i> (2015)	Identifying The Employment Effect Of Invoking And Changing The Minimum wage: A Spatial Analysis Of The UK.	Metode analisis <i>Generalized Method Of Moment</i> (GMM)	Upah minimum nasional, Tingkat tenaga kerja	Tidak terdapat efek yang dapat dilihat dari pengenalan upah minimum nasional pada penyerapan tenaga kerja tetapi menunjukkan bagaimana perkiraan yang lebih tidak mungkin telah mengungkapkan berbagai efek positif dan negatif yang sangat berbeda yang ditemukan dalam beberapa literatur lain.
8	Gindling dan Terrell (2009)	Minimum Wages, Wages And Employment In Various Sectors in Honduras	Metode analisis <i>Fixed Effect</i> dan <i>Generalized Method Of Moment</i> (GMM)	Tenaga kerja, Pengangguran Upah Minimum, Upah	Menunjukkan bahwa upah minimum diberlakukan secara efektif hanya di perusahaan berskala menengah dan besar, di mana kenaikan 1% dalam upah minimum mengarah pada peningkatan 0,29% dalam upah rata-rata dan pengurangan yang relatif

9	Lang dan Kahn (1998)	The Effect Of Minimum-Wage Laws On The Distribution Of Employment: Theory And Evidence	Metode analisis <i>Ordinari Least Square</i> (OLS) dan <i>Generalized Least Squares</i> (GLS)	Upah minimum,, Dewasa >20th, Mahasiswa, Siswa remaja, Lulusan SMA, Tenaga kerja perempuan, Pekerja paruh waktu, Menikah	<p>besar dalam tingkat tenaga kerja sebesar -0,46%. Kami menemukan bahwa upah sektor publik meniru tren upah minimum tetapi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi tidak mengurangi pekerjaan di sana. Tidak ada efek yang dapat dilihat dari upah minimum terhadap upah pekerja di perusahaan kecil atau pekerja mandiri. Namun, upah minimum yang lebih tinggi dapat menciptakan lebih banyak pengangguran. Kami menyimpulkan bahwa, total pendapatan pekerja di sektor tertutup yang besar, dengan upah minimum yang lebih tinggi di Honduras, yang menjamin dialog kebijakan tentang struktur dan tingkat upah minimum.</p>
					<p>Menunjukkan bahwa dalam hukum upah minimum terdapat persaingan yang semakin meningkat dari produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga membuat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah menjadi lebih buruk tanpa membuat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi menjadi lebih baik. Kami memberikan bukti bahwa hukum upah minimum mengalihkan pekerjaan dari orang dewasa ke remaja dan siswa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi distribusi dari upah minimum bahkan ketika mereka meningkatkan pekerjaan.</p>

10	Lemos (2009)	Minimum Wage Effects In a Developing Country	Metode analisis <i>Ordinari Least Square</i> (OLS) dan <i>Generalized Least Squares</i> (GLS)	Upah minimum, Biaya tenaga kerja, Tenaga kerja, Sektor informal	Bahwa upah minimum menekan distribusi upah kedua sektor tetapi tidak mempengaruhi tingkat tenaga kerja. Efek kompresi adalah distribusi upah sektor formal lebih tinggi dibanding distribusi sektor informal. Hasil ketenagakerjaan menunjukkan bahwa baik jumlah pekerjaan maupun jumlah jam kerja yang berubah di kedua sektor setelah kenaikan upah minimum.
11	Menona <i>et al.</i> (2017)	Child Labor And The Minimum Wage: Evidence From India	Metode analisis <i>Ordinari Least Square</i> (OLS)	Upah minimum, Tenaga kerja, pekerja anak	Secara teoritis, dampak upah minimum pada tenaga kerja anak bisa berjalan baik, jadi bukti empiris dari negara dengan tingkat tenaga kerja anak yang tinggi dan segudang undang-undang upah minimum di berbagai negara bagian dan industri membantu mengurangi ambiguitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa memandang jenis kelamin, di daerah perkotaan, upah minimum yang lebih tinggi mengurangi tenaga kerja anak dalam pekerjaan rumah tangga. Di daerah pedesaan hasil yang sama berlaku untuk anak perempuan sementara tenaga kerja rumah tangga meningkat untuk anak laki-laki. Upah minimum hampir tidak berdampak pada tenaga kerja anak di luar rumah di daerah perkotaan dan pedesaan.

12	Sen <i>et al.</i> (2011)	Teen Employment, Poverty, And The Minimum Wage: Evidence From Canada	Metode analisis <i>Ordinari Least Square</i> (OLS)	Tenaga kerja remaja, Kemiskinan, Upah minimum	Menunjukkan bahwa peningkatan 10% dalam upah minimum secara signifikan berkorelasi dengan penurunan 3% -5% dalam tenaga kerja remaja. Lebih jauh, kenaikan 10% dalam upah minimum juga secara signifikan terkait dengan peningkatan 4% -6% dalam persentase keluarga yang tinggal di bawah Low Income Cut Offs (LICOs).
13	Zavodny (2000)	The Effect Of The Minimum Wage on Employment And Hours	Metode analisis <i>Ordinari Least Square</i> (OLS)	Upah minimum, Jam kerja, Tenaga kerja remaja	menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan tingkat tenaga kerja tetapi tidak mempengaruhi jam kerja baik di kalangan remaja yang bekerja atau semua remaja. Hasil tingkat individu tidak menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki dampak negatif yang signifikan pada jam kerja oleh upah rendah remaja yang kemungkinan akan terpengaruh oleh kenaikan upah minimum. Hasilnya menunjukkan bahwa tenaga kerja remaja dengan upah rendah cenderung tetap bekerja, relatif terhadap tenaga kerja remaja dengan upah tinggi, ketika upah minimum dinaikkan. Namun, efek buruk ini hilang ketika tenaga kerja remaja dengan upah rendah ini dibandingkan dengan tenaga kerja remaja upah rendah lainnya selama periode ketika upah minimum tidak meningkat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rangka berfikir peneliti sebagai penjelasan alur berjalannya penelitian sehingga diperoleh Gambaran tentang fokus penelitian yang berdasarkan teori dan kajian empiris. Kerangka konsep dibangun dari suatu pengembangan wilayah. Yang memiliki pengertian adalah sebuah upaya dimana pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan serbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi, dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan berkelanjutan. Tujuan yang dimaksud adalah untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah (Rahayu dan Santoso, 2014) selanjutnya dalam sebuah pembangunan wilayah, yang dalam hal ini adalah pembangunan wilayah dari pulau jawa, yang terbagi dalam 6 provinsi dengan luas wilayah dan mobilitas daerah yang berbeda beda, menjadikan setiap provinsi memiliki potensi yang diunggulkan dari masing-masing provinsi. Selaras dengan hal tersebut, Setiyanto dan Irawan (2012) menjelaskan bahwa konsep wilayah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen adalah sebuah wilayah yang memiliki ciri dimana adanya faktor dominan yang mempunyai sifat homogen pada suatu wilayah tertentu. Wilayah dengan jenis fungsional dicirikan dengan memiliki keterkaitan, ketergantungan, dan saling berinteraksi satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan dalam sebuah kesatuan. Adapun konsep wilayah perencanaan yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan sifat tertentu pada wilayah tersebut, sehingga pembangunan wilayah tersebut perlu dilaksanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Suatu pembangunan yang memperhatikan hal-hal demikian dapat diartikan dengan istilah pembangunan berdimensi wilayah

Sejalan dengan kondisi tersebut, presiden RI mencanangkan program pembangunan, yakni melalui Kantor Staff Presiden (KSP) 2 Tahun Jokowi JK (2016) program tersebut bernamakan “Nawa Cita”. Nawa Cita itu sendiri adalah sebuah pemikiran yang direncanakan guna memajukan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Realisasi program tersebut dapat tercapai

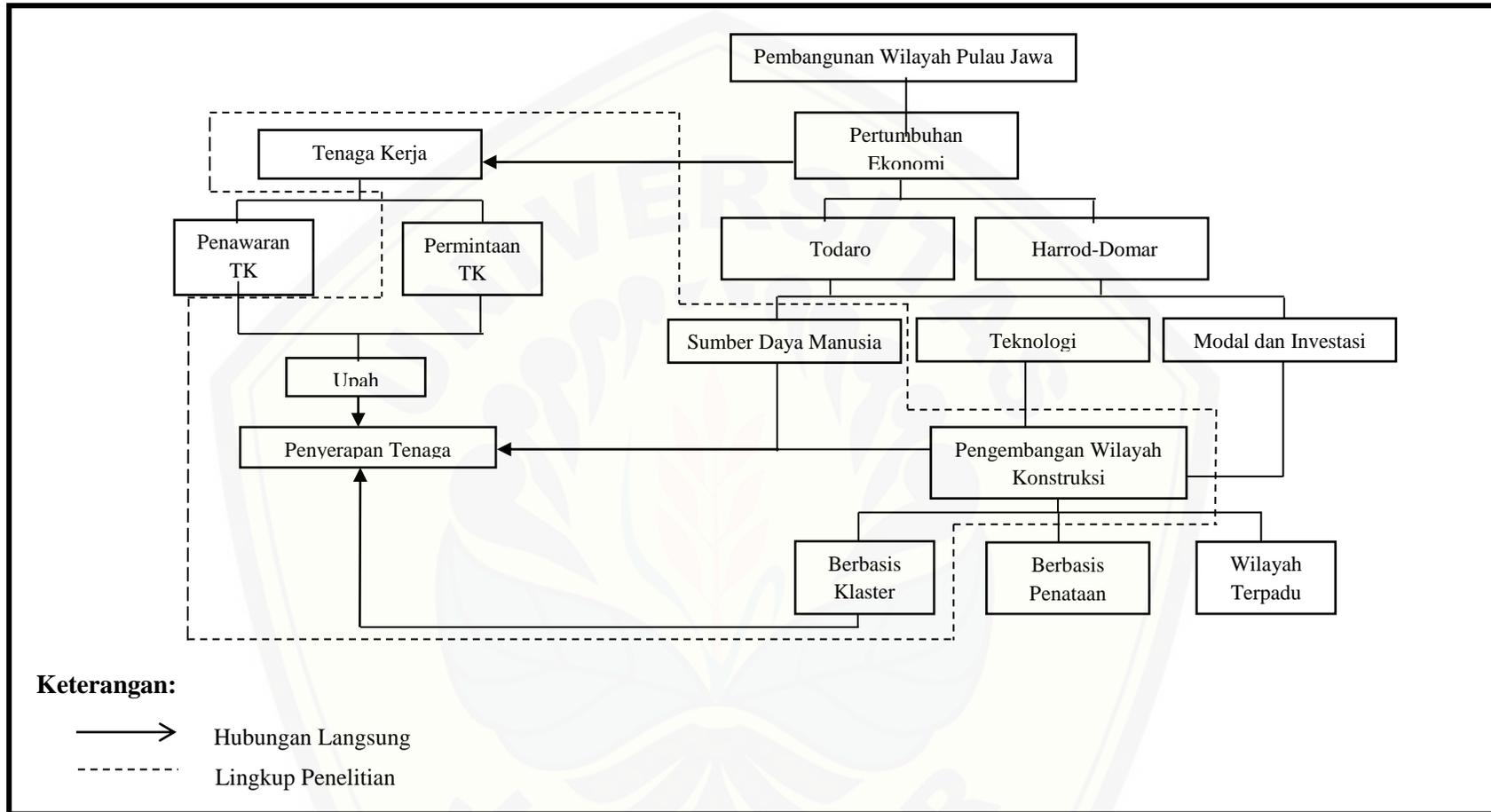
melalui penanganan ekstra yang dimulai dengan pembangunan fondasi kemudian diteruskan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Penelitian ini terfokus pada pembangunan pada sektor pembangunan konstruksi di pulau jawa. Karena Salah satu fokus utama dalam program nawacita adalah infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui perbaikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan penyiapan proyek. Infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara sedang dalam pembangunan tujuannya yaitu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang ketara antara pulau-pulau di Indonesia. Di darat sendiri pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran dan tol.

Selain itu pembangunan wilayah ditinjau pula dari tingkatan pertumbuhan ekonominya. Mirza (2012) juga menjelaskan dimana jika terjadi proses perubahan pembangunan yang terjadi melalui kebijakan-kebijakan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang digunakan untuk subsektor sosial yang terangkum didalam belanja modal, maka akan nantinya terjadi sebuah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik pada suatu periode tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut Wihastuti dan Ma'ruf (2008) menjelaskan mengenai teori para ahli menjadi dasar dalam perubahan proses pertumbuhan ekonomi bangsa yakni, Todaro Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen dalam penentu yang bersifat utama yaitu akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang telah ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan juga sumber daya manusia. Lalu juga tidak ketinggalan upaya dalam kemajuan teknologi. Sedangkan Harrod-Domar yang merupakan sebuah pengembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (AD) tetapi juga terhadap penawaran agregat (AS) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.dalam perspektif yang lebih panjang, investasi akan menambah stok kapital (K). Harrod-Domar mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output*. *Output* yang dimaksudkan disini adalah suatu output potensial yang bisa dihasilkan dengan stok kapital yang ada. Dimana faktor-faktor pandangan para ahli tersebut dengan syarat menuju peningkatan yang baik. Karena apabila di dalam sebuah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka akan membuat proses perbaikan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja juga memiliki hubungan atau keterkaitan secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi, dimana tenaga kerja di dalamnya terdapat permintaan dan penawaran tenaga kerja yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Konteks permintaan dan penawaran dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah pada suatu jenis perusahaan. Yang mana di dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaan, upah untuk mencapai tingkat yang rendah. Dan sebaliknya apabila di dalam sesuatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi. Dalam memutuskan suatu skala dan tingkat output, tenaga kerja, dan kapital dengan keinginan yang optimal, serta dalam membayar seluruh pekerjaannya perusahaan akan mempertimbangkan tingkat upah pasar. Tingkat upah ini akan menyeimbangkan (*market clearing*) permintaan dan penawaran tenaga kerja (Chuzna, 2013; Sadono Sukirno, 2003; dan Kuncoro, 2002) Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Begitupun penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh para pengusaha pada setiap kemungkinan upah pada suatu waktu tertentu. Jadi pada dasarnya tenaga kerja yang bekerja pada suatu periode tertentu tidak terlepas dari sistem upah yang nantinya mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan pada teori pengembangan wilayah yang dijelaskan oleh Setiyanto dan Irawan (2012) juga tidak terlepas pada konsep dasar pembangunan berbasis wilayah. Berbagai konsep pembangunan berdimensi wilayah yang telah berkembang saat ini dan diterapkan pula di Indonesia. Menurut Bappenas (2006) berbagai konsep pengembangan suatu wilayah yang pernah diterapkan diantaranya meliputi konsep pengembangan wilayah berbasis klaster, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, dan konsep pengembangan wilayah terpadu, dan konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Konsep tersebut terfokus pada keterkaitan dan juga ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi hingga jasa pelayanan, serta upaya-upaya inovasi pengembangannya. Pada akhirnya yang dapat dikatakan berhasil adalah yang dapat terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan juga berorientasi eksternal. Pada konsep klaster, dimana sebagai salah satu strategi pengembangan sebuah wilayah telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok, kerja sama bisnis, atau unit-unit usaha atau lembaga yang bersaing, bekerjasama, dan saling tergantung satu sama lain. Pada konsep ini di gunakan guna memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah meningkatkan penyerapan atau kesempatan kerja. Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini, berikut adalah kerangka konseptual yang sistematis.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendugaan / jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang ada dirumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan yang memperdebatkan hubungan antara upah minimum dan tenaga kerja. Pandangan ekonom Neoklasik menyatakan bahwa upah berperan penting terhadap pasar tenaga kerja, dimana upah ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja (Bradley, 2007; Kryriska dan Kopycinska, 2015; Nikoloski, 2016). Pandangan tersebut menyatakan bahwa ketika upah dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan berdampak pada penurunan pada sisi permintaan tenaga kerja (Fletwood, 2016).

Eldring dan alsos (2012) telah mencoba meneliti hubungan antara penetapan upah minimum dan tenaga kerja dengan objek beberapa negara di Benua Eropa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum menyebabkan penurunan nilai pada pekerja dengan upah rendah (*low-quality*), dan akan menyebabkan pengusaha menekan permintaan pada tenaga kerja melalui seleksi yang lebih ketat, sehingga tenaga kerja *fresh graduate* akan memiliki peluang yang sangat kecil yang memiliki pengalaman kerja dan produktivitas yang rendah akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Fenomena upah minimum di Indonesia menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, tujuan dari penetapan dan peningkatan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh (Sitomurang, 2010; Febrianica dan Pratomo, 2015; Wiryawan, 2016). Dalam konteks pasar tenaga kerja konstruksi, tidak terlepas juga dengan jenis-jenis pekerja yaitu jenis pekerja tenaga ahli, dan juga pekerja tetap yang menjadi keterkaitan dinamika pergerakan ketenagakerjaan yang saling terikat. Secara teoritis, penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu teori menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah pada daerah atau negara tersebut. Pandangan teoritis lain menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh upah, tetapi oleh kemampuan yang dimiliki

oleh angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi. Begitu pula dari pandangan empiris juga memiliki pandangan yang saling bertolak belakang. Beberapa teori menyatakan bahwa perubahan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, ada beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa penerapan upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua gap tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya bidang konstruksi, dimana tenaga kerja pada bidang tersebut dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum regional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tetap pada bidang konstruksi dan diikuti pergerakan fluktuatif oleh penyerapan tenaga kerja ahli dan pekerja tetap bidang konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan Masalah dan teori di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah Upah Minimum Provinsi diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi di Pulau Jawa.

2.5 Keaslian dan Limitasi Penelitian

Penelitian ini bermaksud menguji penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi pada enam provinsi di pulau Jawa yang di pengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi. Berikut keaslian dan limitasi penelitian yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.5.1 Keaslian Penelitian

Berikut ini diuraikan beberapa aspek yang menunjukkan keaslian dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Banyak studi sebelumnya yang menjelaskan dan membahas mengenai penyerapan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini terfokus pada penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi dimana Upah Minimum Provinsi sebagai bentuk pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di enam provinsi pada pulau Jawa.

2. Penelitian sebelumnya pada umumnya juga memasukkan pengaruh investasi dalam penyerapan tenaga kerja, namun pada sektor konstruksi pengaruh investasi tidak dikaitkan, karena dalam pembangunan konstruksi dibawah naungan perusahaan berbeda-beda dan jarang dilakukan.

2.5.2 Limitasi Penelitian

Batasan penelitian ini dilakukan untuk memudahkan proses penelitian yang terdiri dari:

1. Pulau Jawa dipilih dalam penelitian ini terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasan dipilihnya enam provinsi di Jawa dikarenakan mobilitas pembangunan daerah yang paling pesat adalah pada pulau Jawa dan juga tercatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar yakni Pulau Jawa.
2. Penelitian ini membatasi penggunaan metode analisis dengan menggunakan metode Panel Least Square (PLS) karena keterbatasan variabel yang digunakan. Selain itu metode PLS dapat dikatakan sudah mampu menguji serta mengGambarkan pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di enam provinsi Pulau Jawa.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 memaparkan sistematika penelitian dimana yang akan digunakan dalam mengestimasi variabel terpilih. Pada subbab 3.1 adalah jenis dan sumber data penelitian beserta objek dan pemilihan tahun penelitian, subbab 3.2 yakni desain penelitian yang akan menjelaskan rangkaian cara kerja penelitian yang akan dilanjutkan dengan proses spesifikasi model pada subbab 3.3. penjelasan mengenai metode analisis penelitian yang menggunakan metode *panel least square* (PLS), akan dijelaskan pada subbab 3.4. pada subab terakhir 3.5 variabel penelitian terdefiniskan.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi penelitian, yang dikumpulkan melalui studi *literature* terhadap publikasi instansi terkait seperti BPS, Artikel Ilmiah, *Text Book*, Jurnal Ilmiah dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder.

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau dalam file digital. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang merupakan penggabungan deret berkala (*time series*) dari tahun 2006-2015 dan deret lintang (*cross section*). Secara umum sumber data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik per provinsi di Pulau Jawa.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Konstruksi tahun 2006 - 2015.
2. Data Upah Minimum Provinsi tahun 2006 - 2015

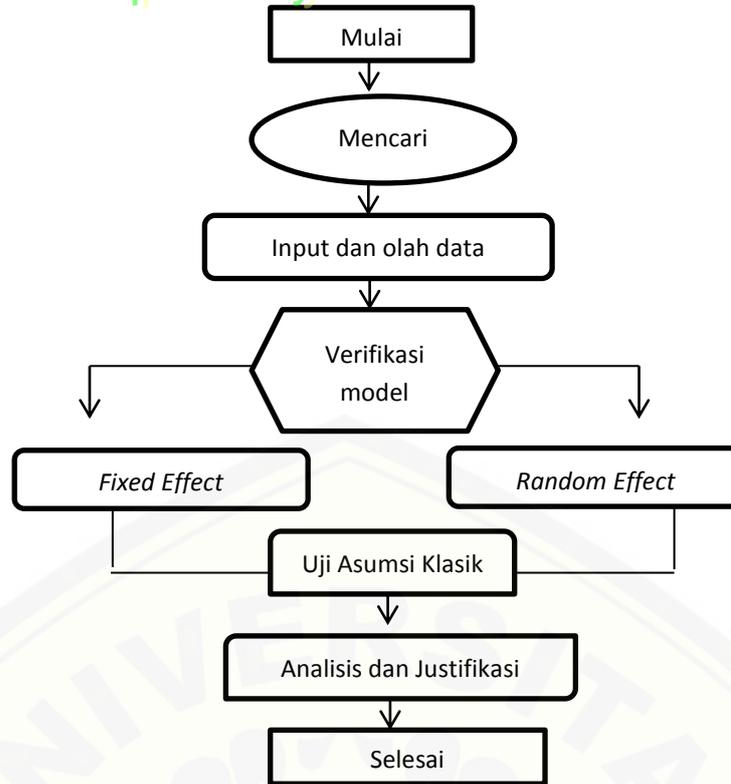
3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data yang sesuai dengan judul atau tema yang diangkat, dimana dalam penelitian ini mengambil tema untuk menganalisis adanya pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di indonesia yang diambil yaitu 6 provinsi di pulau jawa. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data upah

minimum provinsi tahun 2006 hingga 2010 dan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama sektor konstruksi tahun 2006 hingga 2010.

Sebelum dilakukan pengujian model data panel dilakukan uji stasioneritas data yang menggunakan uji unit *root Augmented Dickey-Fuller*. Terdapat tiga tingkatan dalam pengujian ini yaitu *level*, *first difference*, dan *second difference* dengan kategori non, *intercept*, dan *trend intercept*. Maksud dari tingkatan tersebut yaitu apabila data pada tingkat level belum stasioner maka dilanjutkan pada tingkat *first difference*, dan jika masih dirasa belum stasioner juga maka dilanjutkan pada tingkat *second difference* hingga data terstasionerkan pada tingkatan yang sama. Disarankan apabila data stasioner pada tingkat *second difference* dilakukan penambahan data karena kemungkinan hasil lebih besar. Setelah data stasioner, dilanjutkan dengan uji kointegrasi dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel.

Setelah melakukan uji stasioneritas dan kointegrasi tahap selanjutnya adalah mengestimasi model data panel yang dibagi menjadi tiga model yaitu *Panel Least Square*, *Fixed Effect model*, dan *Random Effect Model*. Dalam memilih ketiga model tersebut digunakan pula tiga pengujian, diantaranya adalah uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Pengujian terakhir adalah uji asumsi klasik yang terbagi atas uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Apabila semua tahap dalam pengujian telah terpenuhi, proses selanjutnya yang merupakan proses terakhir dari rangkaian pengujian adalah interpretasi dan justifikasi hasil.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.3 Spesifikasi Model penelitian

Kerangka model dalam penelitian ini berdasarkan model dari penelitian Menon, N., dan Rodgers, Y.V.D.M (2017) guna menyelidiki hubungan antara upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Upah Minimum Provinsi yaitu analisis data panel, dimana merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) data dan deret hitung (*cross section*) data. Model persamaan variabel penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{oi} + \beta X_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana Y_{it} adalah variabel dependen, α adalah konstanta, β adalah vektor $k \times 1$ dari parameter untuk diestimasi pada variabel independen, dan X_{it} adalah vektor $1 \times k$ dari pengamatan pada variabel independen, $t = 1, \dots, T; I = 1, \dots, N$. Berdasarkan model tersebut akan diturunkan menjadi model ekonomi sebagai berikut:

$$TsK = f(UMP) \dots\dots\dots(3.2)$$

$$Tks_{it} = \alpha + \beta_1 UMP_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan :

TsK = Tenaga kerja sektor konstruksi

UMP = Upah Minimum Provinsi

α = Konstanta

i = Provinsi

t = Periode waktu

et = Variabel Pengganggu

3.4 Metode Analisis Data

Beberapa metode dasar yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

3.4.1 Metode *Panel Least Square* (PLS)

Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* (Gujarati dan Porter, 2009). Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengansumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadi bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

1. *Fixed Effect Model*

Pada pendekatan model efek tetap, diasumsikan bahwa *intercept dan slope* (β) dari persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit *cross section* maupun antar unit *time series*. Satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* atau unit *time-series* adalah dengan memasukkan variabel boneka/semu (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-

beda, baik lintas unit *cross-section* maupun antar unit *time series*. Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross section* namun tetap mengasumsikan bahwa *slope* koefisien adalah konstan antar unit *cross section* (Jhonston dan Dinardo, 1997). Pendekatan ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect model/FEM*).

2. *Random Effect Model*

Dalam mengestimasi data panel melalui pendekatan FEM, variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan variabel residual yang dikenal dengan pendekatan *random effect model* (REM). Ide dasar dari REM adalah mengasumsikan error bersifat random. REM diestimasi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Asumsi terpenting dalam model ini adalah bahwa tidak adanya korelasi atau hubungan antar *error term* setiap individu (*cross section*) dengan variabel independen (Jhonston dan Dinardo, 1997).

3.4.2 Prosedur Pengujian *Panel Least Square* (PLS)

1. Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas digunakan guna melihat fluktuasi sebuah data. Data dikatakan stasioner apabila memenuhi asumsi stasioneritas yakni data harus sesuai dengan syarat *central limit theorem* (CLTM). Data harus stokastik, rata-rata dan varian konstan tidak terjadi gap antar dua periode waktu. Stasioneritas sering memiliki implikasi ekonomi yang penting. Oleh karena itu sangat penting untuk dapat mendeteksi keberadaan akar unit dalam rangkaian waktu yang biasanya dengan menggunakan uji akar unit (*unit root*) (Nelson dan Plosser, 1982). Pengujian data menggunakan uji akar unit (*unit root*) dengan jenis pengujian *Augmented Dickey-Fuller*. Data dapat stasioner pada tingkat level, stasioner pada tingkat *first difference* atau stasioner pada *second difference*.

2. Uji Kointegrasi

Variabel yang semuanya secara individu $I(1)$ dan berbeda-beda akan menyimpang bersama. Untuk beberapa kombinasi linier dari satu kumpulan $I(1)$ menjadi $I(0)$ maka variabel dikatakan terkointegrasi. Ketika variabel

terkointegrasi maka memenuhi satu atau lebih hubungan jangka panjang meskipun variabel-variabel tersebut mungkin hubungannya berbeda dalam jangka pendek (Davidson dan MacKinnon, 1999). Uji kointegrasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui bahwa data memiliki keseimbangan jangka panjang (*long run equilibrium*) antara variabel dependen dan independen. Meskipun terdapat keseimbangan dalam jangka panjang namun dalam jangka pendek memungkinkan keduanya tidak mencapai titik keseimbangan. Terdapat beberapa macam dalam melakukan uji kointegrasi data panel diantaranya adalah uji *Johansen Cointegration* dan *Engle-Granger*. Dalam penelitian ini metode kointegrasi menggunakan uji Pedroni, Kao, dan Johansen Fisher dengan cara membandingkan nilai probabilitas alfa dengan nilai probabilitas *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Apabila nilai probabilitas alfa lebih besar dari nilai ADF maka data dinyatakan terkointegrasi dalam jangka panjang

3. Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel lebih baik menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model* dengan asumsi bahwa unit *cross section* memiliki perilaku yang cenderung sama tidaklah realistis dikarenakan unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda (Juanda dan Junaidi, 2012). Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji *chow* yaitu : jika H_0 diterima maka digunakan model *common effect* dan jika H_0 ditolak maka digunakan model *fixed effect*. Jika nilai probabilitas *chi-square* kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *fixed effect model* dan jika probabilitas *chi-square* lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *common effect model*. Analisis data panel kemudian dilanjutkan dengan uji *Hausman*.

4. Uji *Hausman*

Merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Uji *Hausman* memberikan sebuah penilaian menggunakan *Chi-square statistics*. Uji *Hausman* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Jika *Chi-Square* hitung $>$ *Chi-Square* Tabel dan probabilitas hitung $< \alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 ditolak, sehingga model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan. Apabila *Chi-Square* dan Probabilitas hitung $> \alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga model *Fixed Effect* tepat digunakan.

5. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* adalah uji yang digunakan untuk memilih model antara *common effect model* atau *random effect model*. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji LM adalah jika H_0 diterima maka digunakan *common effect model* dan jika H_0 ditolak maka digunakan *random effect model*. Apabila nilai probabilitas pada *Breusch Pagan* yang ditunjukkan oleh angka yang dibawah kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *random effect model* dan jika nilai probabilitas pada *Breusch Pagan* yang ditunjukkan oleh angka yang dibawah lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *common effect model*.

6. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini digunakan sebelum melakukan analisis data. Uji ekonometrika ini untuk mengestimasi parameter regresi dengan menggunakan OLS dimana terdapat enam asumsi klasik. Apakah sesuai atau tidak dengan tiga uji asumsi klasik dalam regresi panel pada penelitian ini diantaranya adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas. Jika terjadi pelanggaran maka akan diperoleh hasil estimasi yang tidak valid (Nurfitriani, 2011).

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah asumsi yang menyatakan adanya korelasi antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel independen lainnya. Gejala multikolinieritas mengindikasikan adanya hubungan yang sempurna antara beberapa maupun seluruh variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi untuk menemukan ada tidaknya korelasi antar

variabel bebas atau independen. Pengujian ada tidaknya multikolinearitas ini dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas uji koefisien korelasi setiap variabel.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gujarati (1993), suatu model regresi linear harus memiliki varian yang sama. Menurutnya, jika asumsi ini tidak dipenuhi maka akan terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *White Heteroskedasticity Test*. Kriteria yang digunakan yaitu, jika nilai probabilitas pada $Obs \cdot R^2 > \alpha$ (taraf nyata) yang digunakan, maka persamaan tidak mengalami heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitas pada $Obs \cdot R^2 < \alpha$ (taraf nyata) yang digunakan, maka persamaan mengalami heteroskedastisitas. Konsekuensi bila terjadi heteroskedastisitas, maka akan berakibat:

1. Estimasi dengan menggunakan OLS tidak akan memiliki varian yang minimum atau estimator tidak efisien.
2. Prediksi (nilai Y untuk X tertentu) dengan estimator dari data yang sebenarnya akan mempunyai varian yang tinggi, sehingga prediksi menjadi tidak efisien.
3. Tidak dapat diterapkannya uji nyata tidaknya koefisien atau selang kepercayaan dengan menggunakan formula yang berkaitan dengan nilai varian.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal.

Uji Normalitas juga bisa dilakukan dengan cara melihat nilai *probability* dari *Jarque Berra*. Jika nilai *probability* dari *Jarque Berra* $< \alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal. Apabila nilai *probability* dari *Jarque Berra* $> \alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi normal.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional variabel ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel yang ada dalam penelitian, serta menghindari meluasnya permasalahan dari judul. Definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Penyerapan TK (Y) adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di sektor konstruksi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Konstruksi tahun 2006 -2015.
2. Upah Minimum Provinsi (X1), adalah upah minimum yang ditetapkan di masing-masing provinsi di pulau jawa pada tahun 2006-2015 dengan satuan ribuan rupiah per bulan. Data yang dipakai adalah data Upah Minimum Provinsi pada tahun 2006-2015 diambil dari BPS.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

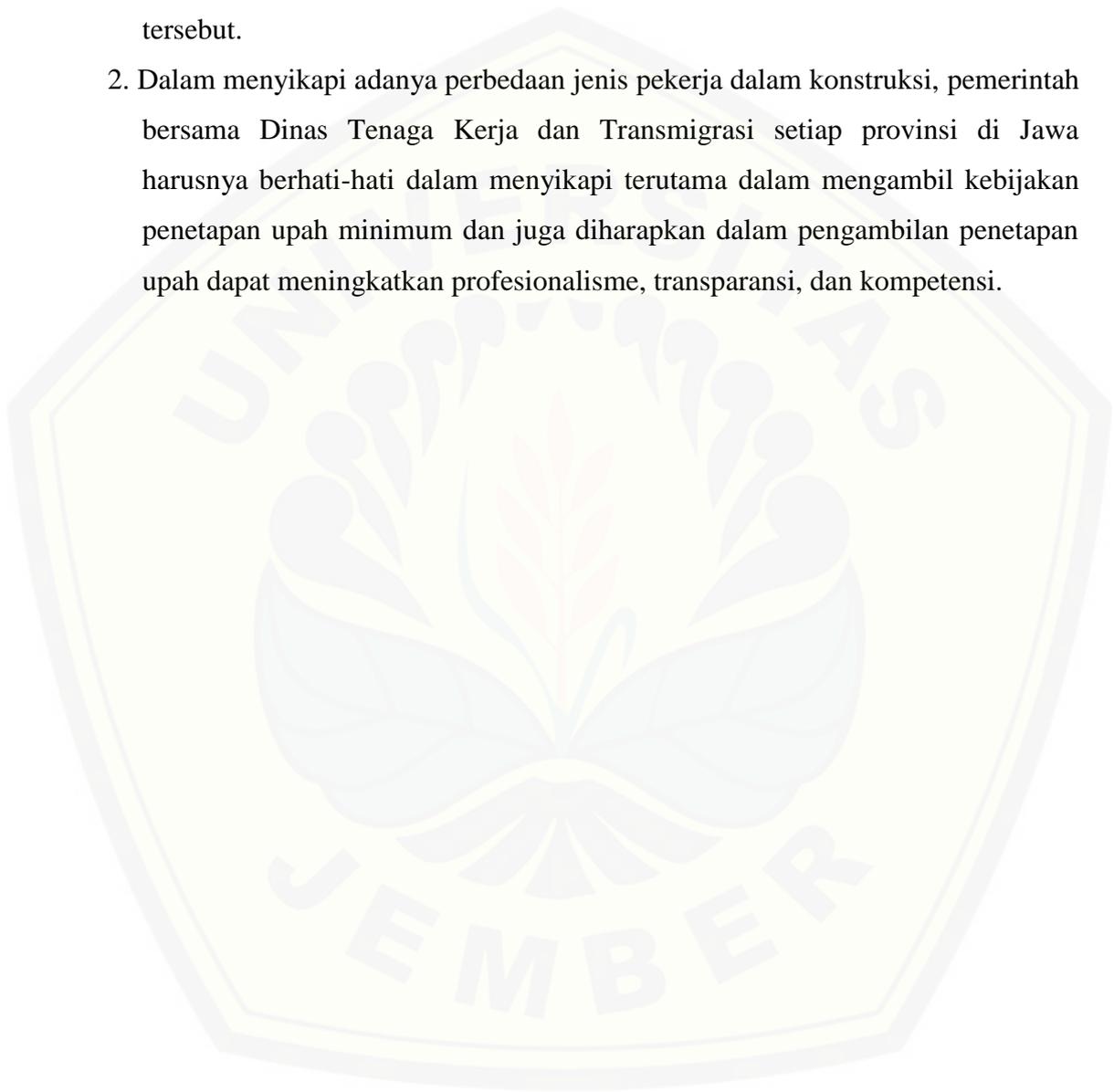
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Bab 4, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil analisis deskriptif pergerakan dinamika ketenagakerjaan pada ke enam provinsi di pulau Jawa antara lain: Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2006 hingga 2015 baik itu dalam konteks tenaga kerja konstruksinya ataupun upah minimumnya. Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja tahun 2006-2015. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif diterima.

5.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berkenaan dengan upaya penyerapan tenaga kerja dalam bidang konstruksi lebih mempertimbangkan perlu adanya peningkatan dan kemudahan yang lebih pada pemberian sertifikat ahli (SKA) mengapa demikian, dalam sebuah proyek konstruksi, terdapat tujuan yang diharapkan apabila tenaga kerjanya memiliki SKA antara lain :
 - a. Untuk menunjang keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Biasanya pada sebuah proyek konstruksi, para pekerja atau tim diharuskan memiliki sertifikat SKA.
 - b. Dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia yang dapat dilihat dari kualitas industri konstruksi melalui sertifikat SKA yang dimiliki. Saat seorang tenaga ahli menangani sebuah proyek konstruksi, kemampuannya bisa dilihat pada sertifikat SKA. Selain untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi seseorang secara nasional, juga bisa untuk skala international.
 - c. Sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai bukti yang sah kompetensi seorang tenaga ahli, perlu memiliki SKA. Sehingga masyarakat akan mengakui kompetensi seorang tenaga ahli dalam bidang konstruksi.

- d. Untuk memenuhi syarat Undang-Undang. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999. Selain itu juga ada Keppres dan SK Menteri tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. Sebagai seorang tenaga ahli yang resmi, perlu adanya memiliki sertifikat keahlian tersebut.
2. Dalam menyikapi adanya perbedaan jenis pekerja dalam konstruksi, pemerintah bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap provinsi di Jawa harusnya berhati-hati dalam menyikapi terutama dalam mengambil kebijakan penetapan upah minimum dan juga diharapkan dalam pengambilan penetapan upah dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kompetensi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H.P dan Adillah, S.U. 2012. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur. Universitas Islam Sultan Agung
- Baek, J dan Park, W. 2015. Minimum wage introduction and employment: Evidence from South Korea. *Economic Letters* 139 (2015) 18-21
- Barthos, Basir. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: Bumi Aksara
- Nisfihani, A. 2013. Pengaruh Upah dan Output Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda. Universitas Mulawarman.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Jumlah Profesi Tenaga Ahli Konstruksi Menurut Provinsi. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Badan Pusat Statistik. 2017. Jumlah Pekerja Tetap Konstruksi Menurut Provinsi. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Badan Pusat Statistik. 2017. Upah Minimum Provinsi. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Badan Pusat Statistik. 2017. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Bazen, S dan Gallo, J. L. 2009. The State–Federal Dichotomy in the Effects of Minimum Wages on Teenage Employment in the United States. *Economics Letters* 105 (2009) 267–269.
- Bodnar, K., Fadejeva, L., Lordache, S., Malk, L., Paskaleva, D., Pesliakaite, J., Jemec, N.T., Toth, P., Wyszyski, R. 2018. How do Firms Adjust to Rises in the Minimum Wage? Survey Evidence from Central and Eastern Europe. *Working Paper Series*, No. 2122.
- Bradley, M.E. 2007. Efficiency Wages and Classical Wage Theory. *Journal of the History of Economic Thought*. Vol. 29. Halaman: 167 – 188.
- Burt. 1963. Labor market, Unions and Government Policies. *Discussion Paper* No. 1159.

- Budiawan, A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. *Economics Development Analysis Journal* Vol. 2 No. 1.
- Cengis, D., Dube, a., Linder, A., Zipperer, B. 2018. The Effect of Minimum Wages on Low – Wage Jobs: Evidence from the United States Using a Bunching Estimator. *CEP Discussion Paper*. No. 1531.
- Chuzna, A. 2013. Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal* 2 (3) (2013)
- Davidson, R., dan MacKinnon, J. G. 2004. *Econometric Theory and Methods*. Canada: Oxford University Press
- Dolton, P., Bondibene, C. R dan Stops, M. 2015. Identifying the Employment Effect of Invoking and Changing the Minimum Wage: A Spatial Analysis of the UK. *Labour Economics* 37 (2015) 54–76
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Eldring, L., Alsos, K. 2012. European Minimum Wage: A Nordic Outlook. *Fafo Report*. Vol. 16.
- Fachreza, A. N. 2017. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Febrianica, D.N., Pratomo, D.S. 2015. Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal*.
- Fletwood, S. 2016. Reflection Upon Neoclassical Labour Economics. *University of the West of England*
- Gujarati, D.N. dan D. C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. 5th ed. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Hafner, M., Taylor, J., Pankowska P., Stepanek, M., Nataraj, S., dan Stolk, C. V. 2016. The Impact of the National Minimum Wage on Employment: A Meta-Analysis. *Research Report RAND Europe*, October, 1-38.
- Herr, H. 2002. Wages, Employment and Prices. *Working Papers of the Business Institute Berlin*. No. 15
- Hohberg, M., Lay, J. 2015. The Impact of Minimum Wages on Informal and Formal Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor and Development*, Vol. 4, No. 14.

- Indradewa, I. G. A dan Natha, K. S. 2012. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah*. Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Jakstiene, S. 2010. Labour Market Segmentation: Theoretical Aspect. *Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos*. Vol. 4, No. 20, Halaman: 53 - 63.
- Jhonston, J dan Dinardo, J. 1997. *Econometrics Methods*. Fourth Edition. New York, McGraw-Hill.
- Juanda, B., Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Kabeya, P.K., Opio, S., Lufuke, M. 2015. The Effect of Minimum Wage on Employment and Working Hours in the Western Europe: A Case of the UK, France and Netherland. *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences*. Vol. 10, No. 1.
- Kantor Staff Presiden (KSP). 2017. 2 Tahun Jokowi-JK. Buku Laporan. <https://id.scribd.com/document/362552708/KSP-2-Tahun-Jokowi-JK-pdf> [Diakses pada Januari 2018].
- Kryriska, E., Kopycinska, D. 2015. Wages in Labour Market Theories. *Folia Oeconomica Stetinensia*.
- Kumas, H., Caglar, A., Kataalp. H.S. 2014. Firm Size and Labour Market Segmentation Theory: Evidence from Turkish Micro Data. *Procedia – Social and Behaviour Sciences*. Vol. 150, Halaman: 360 – 373.
- Kuncoro, H. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 7 No. 1 (2002).
- Lang, K dan Kahn, S. 1998. The Effect of Minimum-Wage Laws on The Distribution of Employment: Theory and Evidence. *Journal of Public Economics* 69 (1998) 67–82.
- Madeline Zavodny. 2000. The Effect of The Minimum Wage on Employment and Hours. *Labour Economics* 7 (2000) 729–750.
- Mankiw, N.Gregory 2003. *Teori Makroekonomi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Maimum Sholeh. 2007. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah:Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. FISE. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Merdekawaty, R., Ispriyanti, D., Sugito. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah menggunakan Model *Spatial Autoregressive (SAR)*. *Journal Gaussian*, Vol. 5, No. 3, Halaman: 525 – 534.

- Menon, N dan Rodgers, Y. V. D. M. 2017. Child labor and the Minimum Wage: Evidence from India. *Journal of Comparative Economics*.
- Miller, R.L dan Meiners, R.E. 1993. Teori Ekonomi Mikro *Intermediate*. Edisi ketiga. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal* 1 (1) (2012).
- Musyafa A. 2015. Identifikasi Kompetensi Tenaga Ahli Pelaksana Konstruksi Perumahan Di Yogyakarta. Jurnal Ilmiah. DIY: Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nelson, C. R., dan Plosser, C. I. trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implication. *Journal of Monetary Economics*, 10: 139-162.
- Neumark, D. 2015. The Effects of Minimum Wages on Employment. *FRBSF Economic Letter*. Vol. 37.
- Neumark, D., Wascher. 2006. Minimum Wages and Employment: A Review of Evidence from the New Minimum Wage Research. *NBER Working Paper*. No. 12663.
- Nikoloski, K. 2016. Neoclassical Economics: Some Marshalian Insights. *Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Economic Series*, No. 4.
- Nurfitriani, R. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi perkembangan Jalan Tol di Indonesia. *Journal of Transport Economics and Policy*, 33 (2).
- Permana, C. D., dan Asmara A. 2010. Analisis Peranan dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* Vol. 7 No.1.
- Priyono, J. 2018. Analisis Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Pekerja Terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Putra, R. E. 2012. Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) (2012).
- Rahayu, E., dan Santoso, E. B. 2014. Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Teknik POMITS* Vol. 3 No. 2 (2014).

- Sara Lemos. 2009. Minimum Wage Effects in a Developing Country. *Labour Economics* 16 (2009) 224–237.
- Sastrohadiwiryo. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jurnal Ilmiah. Jakarta.
- Salvatore, Dominick. 2004. *Theory and problem of Micro Economic Theory. 3rd Edition*. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Jakarta: Erlangga.
- Sen, A., Rybczynski, K., dan Waal, C. V. D. 2011. Teen employment, poverty, and the minimum wage: Evidence from Canada. *Labour Economics* 18 (2011) 36–47.
- Setiyanto, A., dan Irawan, B. 2012. Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional dan Implementasinya.
- Simanjuntak. P. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFEUI.
- Situmorang, B. 2010. Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengetian Sumber-sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan. *Laporan Pengkajian Hukum, BPHN PUSLITBANG*.
- Stupak, J.M. 2018. Economic Impact of Infrastructure Investment. Congressional Research Service. *Analyst in Macroeconomic Policy* 7-2344.
- Sudarsono. 1990. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta:LP3ES.
- Sukirno, S. 2000. Mikroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta.
- Sulistiawati, R. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Pontianak : Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.
- Sumarsono, S. 2003. Ekonomi manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tamada, K. 2011. Analysis of the Determinants of Minimum Wages in Japan. *RIETI Discussion Paper Series*, 13 – J – 013.
- Tandung, L. S. R. 2015. Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- T.H. Gindling dan Katherine Terrell. 2009. Minimum Wages, Wages and Employment in Various Sectors in Honduras. *Labour Economics* 16 (2009) 291–303.

- Todaro, M.P, dan Smith, S, C. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Vazquez, R. M. C., Esquivel, G., dan Hernandez, S. S. 2017. The Impact of the Minimum Wage on Income and Employment in Mexico. *CEPAL Review*, 122: 190-216.
- Wiryan, I.W.G. Dilematika Kebijakan Upah Minimum dalam Pengupahan di Indonesia. *Journal Advokasi*, Vol. 6, No. 1.
- Wihastuti, L., dan Ma'ruf, A. 2008. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 44 – 55*.
- World Bank. 1994. *World Development Report 1994 : Infrastructure for Development*. New York: Oxford University Press.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/687361468340136928/World-Development-Report-1994-infrastructure-for-development-executive-summary>. [Diakses pada 18 Januari 2018].

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Konstruksi, dan Upah Minimum Provinsi Tahun 2006-2015.

Provinsi	Tahun	TsK	UMP
DKI Jakarta	2006	178,142	819,100
DKI Jakarta	2007	166,999	900,560
DKI Jakarta	2008	178,668	972,604
DKI Jakarta	2009	190,992	1,069,865
DKI Jakarta	2010	191,493	1,118,009
DKI Jakarta	2011	162,763	1,290,000
DKI Jakarta	2012	177,870	1,529,150
DKI Jakarta	2013	180,091	2,200,000
DKI Jakarta	2014	219,248	2,441,000
DKI Jakarta	2015	229,594	2,700,000
Banten	2006	132,295	661,613
Banten	2007	158,778	746,500
Banten	2008	170,628	837,000
Banten	2009	162,550	917,500
Banten	2010	227,432	955,300
Banten	2011	223,801	1,000,000
Banten	2012	236,395	1,042,000
Banten	2013	244,250	1,170,000
Banten	2014	277,458	1,325,000
Banten	2015	286,995	1,600,000
Jawa Barat	2006	894,086	447,654
Jawa Barat	2007	926,860	516,840
Jawa Barat	2008	1,021,072	568,193
Jawa Barat	2009	967,683	628,191
Jawa Barat	2010	1,006,635	671,500
Jawa Barat	2011	1,192,630	732,000
Jawa Barat	2012	1,295,072	780,000
Jawa Barat	2013	1,284,643	850,000
Jawa Barat	2014	1,485,424	1,000,000
Jawa Barat	2015	1,691,596	1,000,000
D.I.Yogyakarta	2006	133,499	460,000
D.I.Yogyakarta	2007	153,273	500,000
D.I.Yogyakarta	2008	150,571	586,000
D.I.Yogyakarta	2009	145,381	700,000

D.I.Yogyakarta	2010	109,933	745,694
D.I.Yogyakarta	2011	134,183	808,000
D.I.Yogyakarta	2012	132,244	892,660
D.I.Yogyakarta	2013	104,506	947,114
D.I.Yogyakarta	2014	146,349	988,500
D.I.Yogyakarta	2015	154,956	988,500
Jawa Tengah	2006	911,843	450,000
Jawa Tengah	2007	1,123,838	500,000
Jawa Tengah	2008	1,006,994	547,000
Jawa Tengah	2009	1,028,429	575,000
Jawa Tengah	2010	1,046,741	660,000
Jawa Tengah	2011	1,098,201	675,000
Jawa Tengah	2012	1,219,893	765,000
Jawa Tengah	2013	966,353	830,000
Jawa Tengah	2014	1,269,113	910,000
Jawa Tengah	2015	1,529,103	910,000
Jawa Timur	2006	893,811	340,000
Jawa Timur	2007	955,072	448,500
Jawa Timur	2008	965,771	500,000
Jawa Timur	2009	974,005	570,000
Jawa Timur	2010	894,648	630,000
Jawa Timur	2011	1,129,860	705,000
Jawa Timur	2012	1,250,532	745,000
Jawa Timur	2013	1,047,454	866,250
Jawa Timur	2014	1,259,443	1,000,000
Jawa Timur	2015	1,510,085	1,000,000

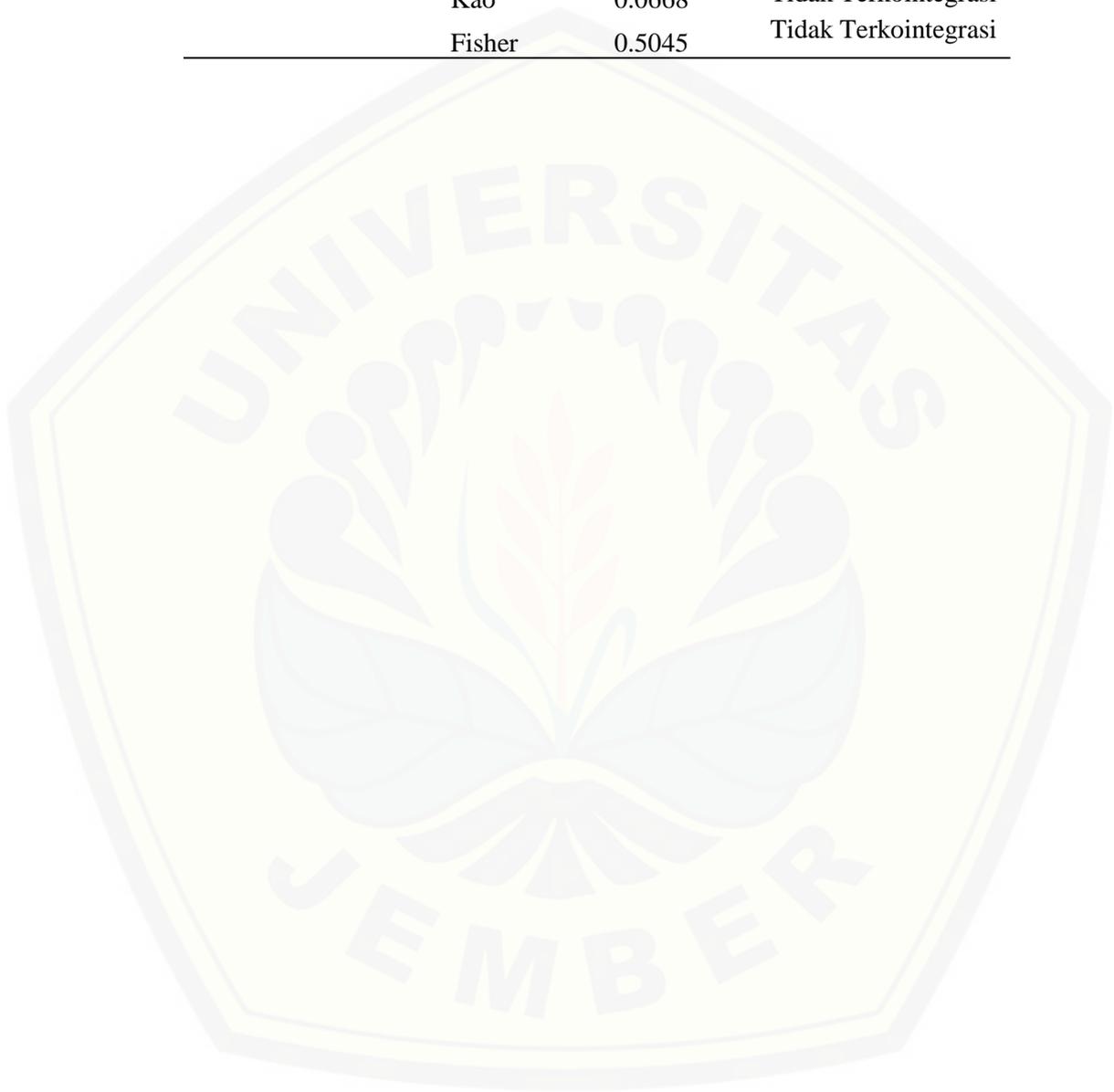
Lampiran 2. Hasil Uji Stasioneritas

Levin, Lin, Chu, (LLC)	Prob. ROA	Prob. NPL
Level	0.9136*	0.0101
1 st difference	0.0000*	0.0000*
Im Pesaran, Shim (IPS)	Level	0.9810* 0.1698
1 st difference	0.0071*	0.0003*
Augmented Dickey Fuller (ADF)	Level	0.9640* 0.1945
1 st difference	0.0036*	0.0003*
Phillip Perron (PP)	Level	0.9747* 0.4389
1 st difference	0.0000*	0.0000*

*: stasioner 5%

Lampiran 3. Hasil Uji Kointegrasi

Keterangan	Metode	Nilai ADF Stat	Kointegrasi
UMP	Pedroni	0.5503	Tidak Terkointegrasi
	Kao	0.0668	Tidak Terkointegrasi
	Fisher	0.5045	Tidak Terkointegrasi



Lampiran 4a. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.179502	(5,47)	0.3335
Cross-section Chi-square	6.383270	5	0.2707

Lampiran 4b. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.055627	1	0.8135

Lampiran 4c. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 06/08/18 Time: 16:06

Sample: 2006 2015

Total panel observations: 54

Probability in ()

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	7.04E-05 (0.9933)	10.41536 (0.0012)	10.41543 (0.0012)

Lampiran 4d. Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: DY
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/08/18 Time: 23:00
 Sample (adjusted): 2007 2015
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DX1	1.767114	1.888823	0.935564	0.3538
C	42134.03	15999.86	2.633400	0.0111

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	17657.85	0.0275
Idiosyncratic random	104936.9	0.9725

Weighted Statistics

R-squared	0.016648	Mean dependent var	37338.95
Adjusted R-squared	-0.002263	S.D. dependent var	104515.9
S.E. of regression	104634.1	Sum squared resid	5.69E+11
F-statistic	0.880352	Durbin-Watson stat	2.105469
Prob(F-statistic)	0.352443		

Lampiran 5a. Hasil Uji Multikolinearitas

	DY	DX1
DY	1.000000	0.126017
DX1	0.126017	1.000000

Lampiran 5b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 06/08/18 Time: 16:59

Sample (adjusted): 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DX1	0.813816	1.329879	0.611947	0.5432
C	74223.43	10061.07	7.377292	0.0000

Lampiran 5c. Hasil Uji Normalitas

